



**PEMERINTAH
KABUPATEN
TAPIN**

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

LKjIP 2024

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tapin



Dinas Komunikasi Dan Informatika
Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
E-mail: *kominfotapin@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran. Meskipun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih terdapat banyak kekurangan. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan ini.

Rantau, 15 Februari 2025

Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin



Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	2
1.2.2. Anggaran.....	4
1.3. Dasar Hukum.....	5
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 7
2.1. Tujuan Dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.....	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2. Efisiensi Anggaran.....	69
 BAB IV PENUTUP.....	 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	7
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	8
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024.....	9
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	26
Tabel 3.4 Komponen Penilaian Sasaran 1	26
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1.....	28
Tabel 3.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 1	30
Tabel 3.7 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 1	30
Tabel 3.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	33
Tabel 3.9 Komponen Penilaian Sasaran 2	34
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2	36
Tabel 3.11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2.....	37
Tabel 3.12 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 2	38
Tabel 3.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	40
Tabel 3.14 Komponen Penilaian Sasaran 3.....	41
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3	43
Tabel 3.16 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 3.....	45
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Sasaran 3 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	45
Tabel 3.18 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 3	46
Tabel 3.19 Lokasi CCTV Publik.....	56
Tabel 3.20 Rekap Berita Media Online Tahun 2024	58
Tabel 3.21 Kerjasama Layanan Hubungan Media	60
Tabel 3.22 Rekapitulasi Aduan Di Aplikasi LAPOR Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.	61
Tabel 3.23 Nilai Indeks Pembangunan Statistik	63
Tabel 3.24 Kebijakan Keamanan Informasi.....	65
Tabel 3.25 Jumlah Pengguna TTE Berdasarkan Status Tahun 2024.....	66

Tabel 3.26 Jumlah Pengguna TTE Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	66
Tabel 3.27 Kertas Kerja Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Sasaran 3	68
Tabel 3.28 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	69
Tabel 3.29 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	27
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	29
Grafik 3.3 Indeks Profesionalitas ASN	36
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian IP-ASN Perangkat Daerah	37
Grafik 3.5 Indeks SPBE Kabupaten Tapin.....	41
Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks SPBE	44
Grafik 3.7 Indeks SPBE Tahun 2024.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ...	4
Gambar 3.1 Asistensi Pohon Kinerja, Perbaikan IKU dan PK.....	32
Gambar 3.2 Pemanfaatan Aplikasi E-SAKIP dan Monev Rencana Aksi.....	33
Gambar 3.3 Bimtek Penilaian SPIP dan Pengelolaan BMD.....	40
Gambar 3.4 Jaringan Fiber Optic.....	54
Gambar 3.5 Aplikasi Layanan Terintegrasi.....	55
Gambar 3.6 Koordinasi Evaluasi SPBE dan Pendampingan Arsitektur SPBE	57
Gambar 3.7 Konten Berita Pada Media Facebook Dan Instagram	58
Gambar 3.8 Konten Berita Pada Media Elektronik Online	59
Gambar 3.9 Fasilitasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).....	59
Gambar 3.10 Sosialisasi dan Monitoring SP4N LAPORI!	62
Gambar 3.11 Layanan Informasi Publik.....	62
Gambar 3.12 Kegiatan Monev EPSS	64
Gambar 3.13 Indeks KAMI.....	65
Gambar 3.14 Launching CSIRT Kabupaten Tapin.....	66
Gambar 3.15 Bimbingan Teknis TTE	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin :

1.2.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Persandian;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan Data Statistik Sektoral;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- g. Pengelolaan kesekretariatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

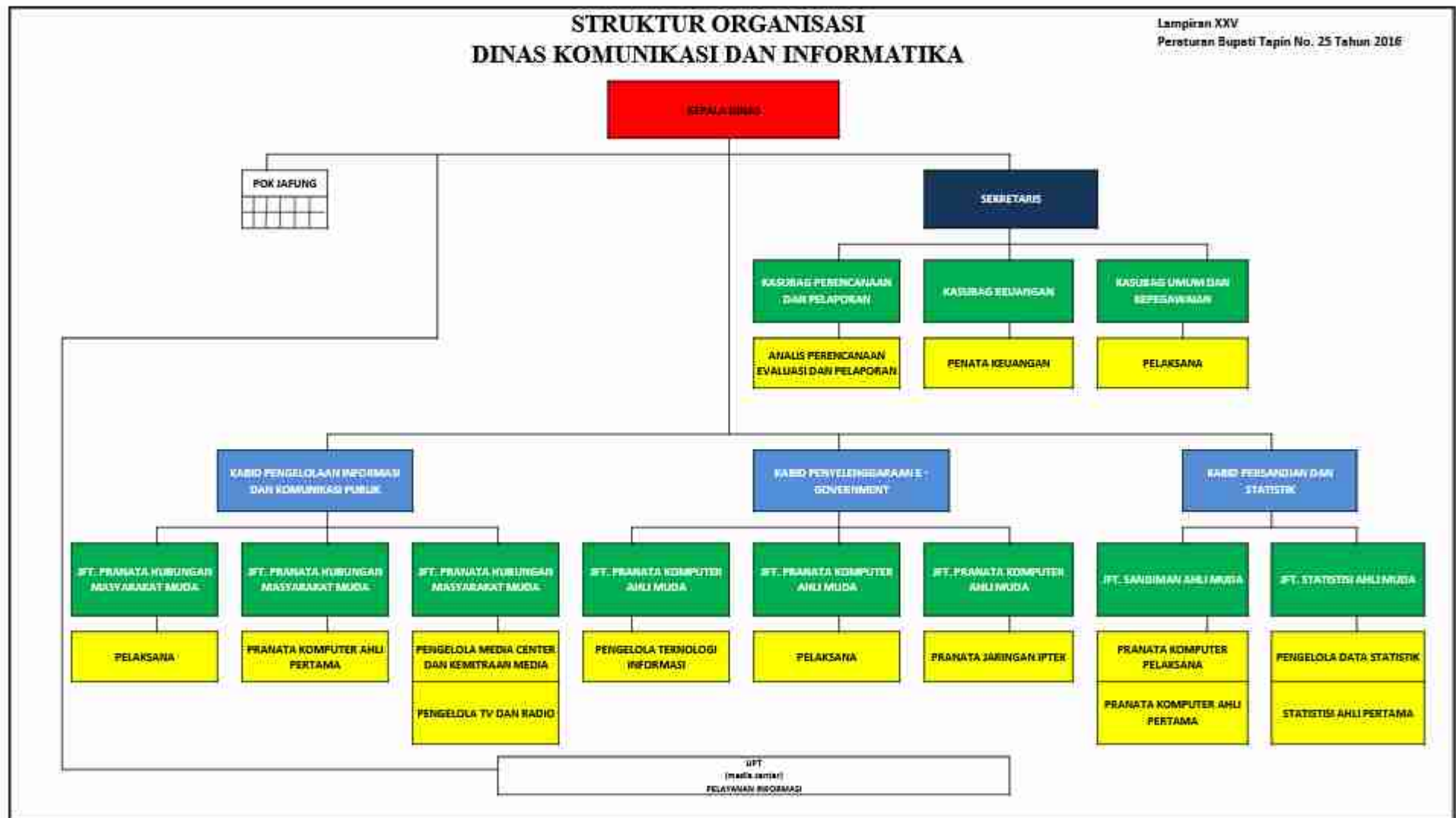
Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - a. JFT. Pranata Hubungan Masyarakat.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri atas:

- a. JFT. Pranata Komputer.
- 4. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas;
 - a. JFT. Sandiman; dan
 - b. JFT. Statistisi.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana

Berikut bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin:

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 12.792.805.746
APBD	Tahun 2024	Rp 20.305.941.482

Sumber : DPA Dinas Kominfo TA.2023 dan 2024

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026; dan
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun
Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	76 poin	80 poin	82 poin
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 poin	80 poin	82 Poin
1.2		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	55 poin	72 poin	75 poin
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	3,5 poin	3,6 poin	3,7 poin
2.1		Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	3,5 poin	3,6 poin	3,7 poin

Sumber : Renstra Dinas Kominfo Periode 2024 -2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP merupakan sistem penilaian yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.	Komponen : ➤ Perencanaan Kinerja 30% ➤ Pengukuran Kinerja 30% ➤ Pelaporan Kinerja 15% ➤ Evaluasi Kinerja 25%	LHE AKIP
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai	IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan dimensi penilaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan hukuman disiplin yang pernah diterima.	Dimensi: ➤ Kualifikasi 25% ➤ Kompetensi 40% ➤ Kinerja 30% ➤ Disiplin 5%	Rekap Aplikasi MyASN
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	Nilai	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE berdasarkan domain kebijakan, tatakelola, manajemen, dan layanan SPBE	Domain : ➤ Kebijakan 13% ➤ Tata Kelola 25% ➤ Manajemen 16,5% ➤ Layanan 45,5%	LHE SPBE

Sumber: Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Tahun 2024

No	Jenjang Level	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 poin
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	55 poin
		Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	3,5 poin
2	Esselon III (Sekretariat)	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,85 poin
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,15 poin
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,85 poin
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	15,15 poin
		Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%
3	Esselon III (Persandian dan	Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6

	Statistik)	Memastikan Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Satu Pintu	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	90%
		Meningkatnya pengamanan sistem elektronik dan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	72%
		Meningkatnya Tata kelola pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%
		Meningkatnya Teknologi dan keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	50%
4	Eselon III (Penyelenggaraan E-Government)	Meningkatnya jaringan intra antar perangkat daerah yang dikelola oleh Diskominfo	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	35%
		Terintegrasinya pelayanan publik secara online antar perangkat daerah	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87%
		Berkurangnya wilayah low spot (sinyal lemah)	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	64%
5	Eselon III (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik)	Meningkatnya citra positif atau persepsi positif terhadap kabupaten tapin	Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	70%
		Terlaksananya Pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM) yang telah dibentuk	Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	75%
		Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%
		Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	90%
		Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai	Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai	86%

		dengan target standar nasional	dengan target standar nasional	
			Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%
6	Esselon IV (Sekretariat) Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	90%
			Persentase laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang ditindaklanjuti	95%
7	Esselon IV (Sekretariat) Subbag Keuangan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100%
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
8	Esselon IV (Sekretariat) Subbag Umum Dan Kepegawaian	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	41%
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan baik	100%
9	JFT. Statistisi	Meningkatnya produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	90%
		Meningkatnya kerja sama dalam pengumpulan data sektoral dari perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	90%

		Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	60%
		Tersedianya Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan) untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	1 aplikasi
		Tersusunnya Proses Bisnis Statistik Sektoral	Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 dokumen
		Terlaksananya MoU dengan produsen data	Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	90%
		Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	50%
		Terlaksananya Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	67%
10	JFT. Sandiman	Meningkatnya SDM yang memiliki sertifikasi sandiman	Persentase sandiman yang tersertifikasi	50%
		Meningkatnya Pengelolaan resiko keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	60%
		Meningkatnya Kerangka kerja keamanan informasi	Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan	50%
		Meningkatnya Pengelolaan aset informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%
		Terlaksananya bimtek sistem keamanan informasi	Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sandiman	Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	50%
		Optimalnya penggunaan tanda tangan elektronik pada perangkat daerah untuk tata kelola resiko keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	50%
		Terbentuknya tim Computer Security Incident	Persentase SK tim Computer Security	100%

		Response Team (CSIRT) untuk menindaklanjuti laporan keamanan informasi	Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	
		Optimalnya penggunaan pola hubungan komunikasi sandi perangkat daerah	Persentase titik PHKS yang teramankan	33%
		Terlaksananya monev atas penggunaan TTE pada perangkat daerah	Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	45%
		Tersusunnya kebijakan daerah tentang PHKS	Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%
11	JFT. Pranata Komputer	Pembangunan sarana telekomunikasi	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	60%
		Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi perangkat daerah	Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%
		Meningkatnya tingkat keaktifan pengelolaan website perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	56%
		Melakukan monitoring pengelolaan website perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	100%
12	JFT. Pranata Komputer	Meningkatnya kualitas akses internet untuk perangkat daerah	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%
		Tercukupinya WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat	Persentase WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat	56%
		Tersedianya server yang sesuai standar	Persentase server sesuai standar	48%
		Menyampaikan rekomendasi atas hasil survey kualitas akses internet untuk ditindaklanjuti	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi	74%
		Menambah WiFi publik	Persentase WiFi publik yang sudah terbangun	56%
		Menambah Kapasitas Server	Persentase server yang mampu mengelola database	60%
13	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat	Terlaksananya MoU antar stakeholder untuk peningkatan jasa publikasi daerah	Persentase MoU yang diterbitkan	100%
		Tersedianya konten informasi publik	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	90%
		Meningkatnya peran PPID pelaksana	Persentase PPID pelaksana aktif	91%
		Meningkatnya kapasitas admin PPID	Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%

		Optimalisasi kerja sama dengan media elektronik Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Persentase jumlah jam tayang	87%
		Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	75%
		Terlaksananya verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%
14	Pelaksana (Sub Bagian Perencanaan)	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen
15	Pelaksana (Sub Bagian Keuangan)	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 orang/ bulan
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan
16	Pelaksana (Sub Bagian	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket

	Umum dan Kepegawaian)	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
		Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan
		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
		Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 unit
		Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
		Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit
17	Pelaksana (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik)	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11 dokumen
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	114 orang
		Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 dokumen
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	7 dokumen
		Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 layanan

		Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 dokumen
18	Pelaksana (Penyelenggaraan E-Government)	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5 dokumen
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 unit
		Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen
		Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 unit
		Terlaksananya Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	13 dokumen
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	11 dokumen
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	10 dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 dokumen
19	Pelaksana (Statistik)	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	1 orang

		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	75 orang
20	Pelaksana (Persandian)	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 perangkat daerah
		Optimalnya penggunaan pola hubungan komunikasi sandi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 perangkat daerah

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	26,85 poin
		1. Perencanaan Kinerja	23,15 poin
		2. Pengukuran Kinerja	11,85 poin
		3. Pelaporan Kinerja	15,15 poin
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4. Evaluasi Internal	
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi	95%

		perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan
1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 orang/bulan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas	41%
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
1.3.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi Baik	100%
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 unit
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi	100%

		kepegawaian dengan Baik	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi Baik	100%
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rasio Sentimen Publik Terhadap Kabupaten Tapin Di Media Sosial	70%
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Yang Dibina	75%
		Persentase Peningkatan Jasa Publikasi Daerah	80%
		Persentase Ketersediaan Data Informasi Publik Yang Di Sediakan	90%
		Persentase Aduan Masyarakat Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) Yang Sesuai Dengan Target Dan Standar Nasional	86%
		Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi Yang Respon Time Untuk Ditindaklanjuti Pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor)	90%
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	90%
		Persentase jumlah jam tayang	87%
		Persentase MoU yang diterbitkan	100%
		Persentase PPID pelaksana aktif	91%
		Persentase admin PPID yang	76%

		ditingkatkan kapasitasnya	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	75%
		Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%
2.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11 dokumen
2.1.2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	114 orang
2.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 dokumen
2.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	7 dokumen
2.1.5	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 layanan
2.1.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 dokumen
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Yang Dikelola Oleh Diskominfo	35%
		Persentase Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	87%
		Persentase Desa / Kelurahan Bebas Low Spot (Sinyal Lemah)	64%
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	60%
		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%
		Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	56%
		Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	56%
3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	5 dokumen

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
3.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 unit
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%
		Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	56%
		Persentase server sesuai standar	64%
		Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi	74%
		Persentase wifi publik yang sudah terbangun	56%
		Persentase server yang mampu mengelola database	67%
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen
3.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 unit
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	13 dokumen
3.2.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	11 dokumen
3.2.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	10 dokumen
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,6 Poin
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	90%
		Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	90%
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	90%
		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	90%
		Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	60%

		Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	1 Aplikasi
		Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 Dok
		Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	90%
		Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	50%
		Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	67%
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 dokumen
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	1 orang
4.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	75 orang
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	72%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	50%
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sandiman yang tersertifikasi	50%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	60%
		Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan	60%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%
		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%
		Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	50%

		Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	50%
		Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%
		Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	100%
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 perangkat daerah
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik PHKS yang teramankan	33%
		Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 perangkat daerah

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan Bupati Tapin pada tahun 2024. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Poin	79,05 Poin	104,01	Sangat Tinggi	LHE AKIP
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	55 Poin	76,87 Poin	139,76	Sangat Tinggi	Rekap Aplikasi MyASN
3	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,5 Poin	3,81 Poin	108,86	Sangat Tinggi	LHE SPBE

Sumber : Monev Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Sasaran kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	a. Perencanaan Kinerja = 30 b. Pengukuran Kinerja = 30 c. Pelaporan Kinerja = 15 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = 25

Sumber : PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021

Penetapan bobot Penilaian SAKIP Perangkat Daerah diatas berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

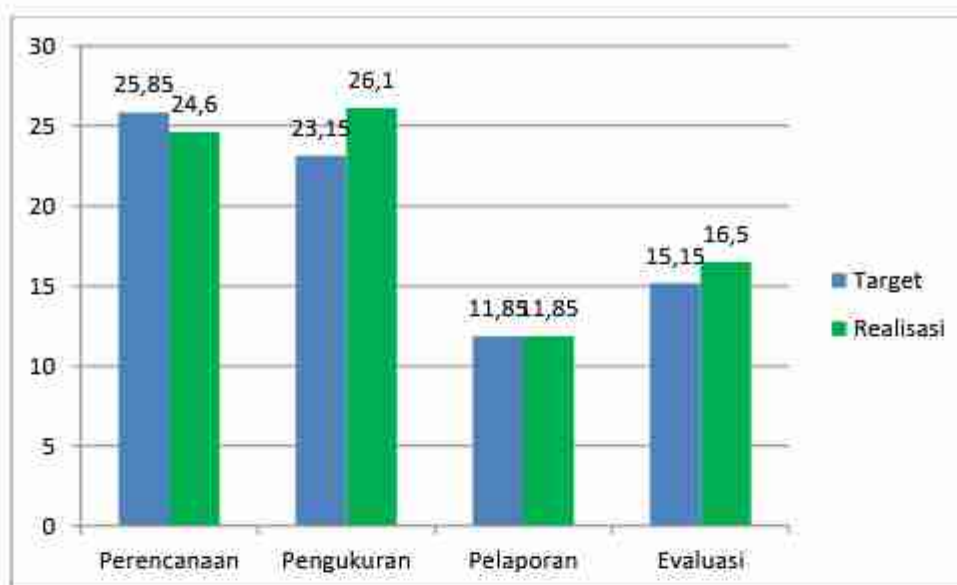
Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 untuk Dinas Kominfo mencapai 79,05 poin dengan predikat BB (Sangat Baik), dari target nilai tahun 2024 pada 76 poin dengan capaian 104,01% dengan kategori Sangat Tinggi. Penilaian tersebut menunjukkan Tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas Pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Komponen Penilaian Sasaran 1

Komponen Yang Dinilai		Target	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	25,85	24,60
B	Pengukuran Kinerja	23,15	26,10
C	Pelaporan Kinerja	11,85	11,85
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,15	16,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		76	79,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : Monev Rencana Aksi Dinas Kominfo Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan pada grafik capaian penilaian berikut dibawah ini :



Grafik 3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa Pada komponen Perencanaan Kinerja diukur berdasarkan pemenuhan ketersediaan dokumen dan kualitas dokumen. Untuk Dinas Kominfo pada komponen ini mendapat nilai 24,6 poin dari target nilai 25,85 poin sudah sangat baik, dimana dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, Dokumen Renstra, Dokumen Renja, RKA dan dokumen perencanaan lainnya telah memenuhi standar yang baik dengan menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain. Serta perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum menantang sehingga perlu dilakukan Analisa Penetapan target kinerja.

Pada komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 26,10 poin dari target 23,15 poin juga sangat baik, dimana Dinas Kominfo telah melakukan pengukuran dengan melakukan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja juga telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dinas Kominfo juga telah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

Dalam Pelaporan Kinerja Dinas Kominfo mendapat nilai 11,85 poin dari target 11,85 poin telah mencapai target. Dokumen laporan kinerja yang disediakan telah disusun secara berkala, direviu, diformalkan, dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu. Dokumen laporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi. Namun dokumen laporan kinerja dinilai belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan. Sehingga perlu diperhatikan agar dapat memuat upaya nyata serta hambatan nya dalam perbaikan kinerja kedepan.

Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Kominfo mendapat nilai 16,50 poin dari target 15,15 poin, capaian ini sudah melebihi target. Dimana Dinas Kominfo telah melaksanakan Evaluasi secara berjenjang pada seluruh unit kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaannya telah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Impelementasi SAKIP telah meningkat karena adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dari pencapaian komponen diatas dengan adanya perbaikan penyusunan Pohon Kinerja melalui penjenjangan kinerja (Cascading) sesuai Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021, Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) atas hasil asistensi perbaikan Pohon Kinerja, kemudian pemanfaatan IT dalam Pengukuran kinerja dan Evaluasi kinerja Internal melalui pemanfaatan aplikasi internal SiEmon Diskominfo dan pemanfaatan e-SAKIP New Generation.

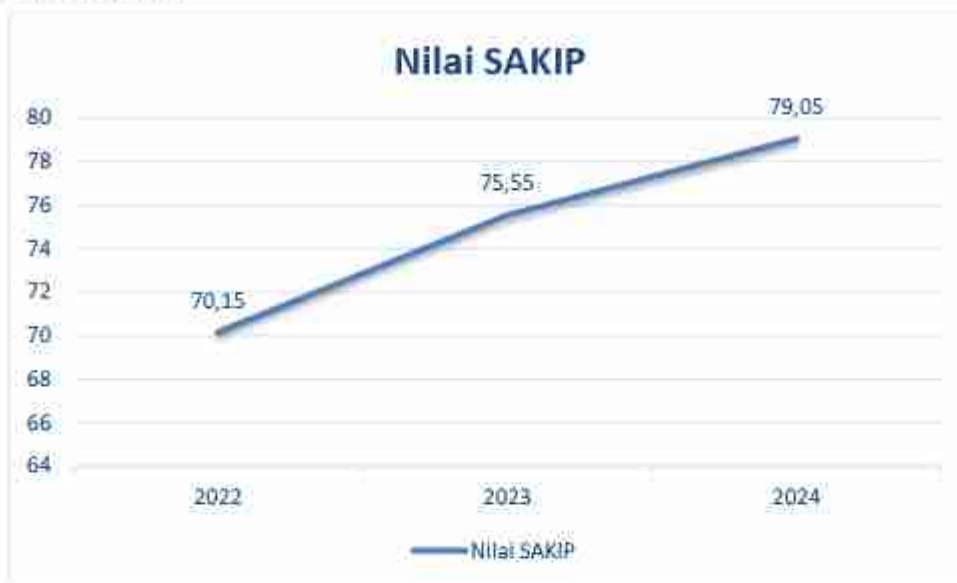
Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,15 poin	75,55 Poin	76 Poin	79,05 Poin	104,01

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :



Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 untuk Dinas Kominfo mencapai 79,05 poin dengan predikat BB, dari target Nilai tahun 2024 pada 76 poin dengan capaian 104,01%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 pada nilai 75,55 poin dan realisasi tahun 2022 pada nilai 70,15 poin, maka terjadi peningkatan masing-masing sebesar 4,63% dari 99,41% ditahun 2023 dan peningkatan sebesar 12,63% dari tahun 2022. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Evaluator APIP Inspektorat bahwa penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, menunjukkan hasil yang "Sangat baik".

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode 2024-2026 dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$realisasi = \frac{realisasi\ tahun\ n}{target\ renstra} \times 100\%$$

Jika nilai persentase perbedaan kinerja yang diperoleh melebihi 100%, maka dapat dianggap bahwa peningkatan kinerja tahun ini dibandingkan dengan dengan target renstra adalah 100%, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	% Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,05 Poin	82 Poin	96,40

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Capaian dari Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 untuk Dinas Kominfo mencapai 79,05 poin dengan predikat BB, dari target nilai tahun 2024 pada 76 poin dengan capaian 104,01%. Dibandingkan dengan Akhir Renstra Tahun 2026 pada target nilai 82 poin dengan tingkat kemajuan 96,40%, maka capaian sudah sangat baik.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 1

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Poin	79,05 Poin	104,01%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,85%	24,60	104,01%
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,15%	26,10	
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,85%	11,85	
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	15,15%	16,50	
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappellitbang	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	90%	90%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja	95%	95%	100%

		yang ditindaklanjuti			
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan	10 Laporan	100%
1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang	288 Orang	100%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Faktor Pendukung Keberhasilan :

- Adanya perbaikan penyusunan Pohon Kinerja melalui penjenjangan kinerja (Cascading) sesuai Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021,
- Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) atas hasil asistensi perbaikan Pohon Kinerja,
- Pemanfaatan IT dalam Pengukuran kinerja dan Evaluasi kinerja Internal melalui pemanfaatan aplikasi internal SiEmon Diskominfo dan pemanfaatan e-SAKIP New Generation.

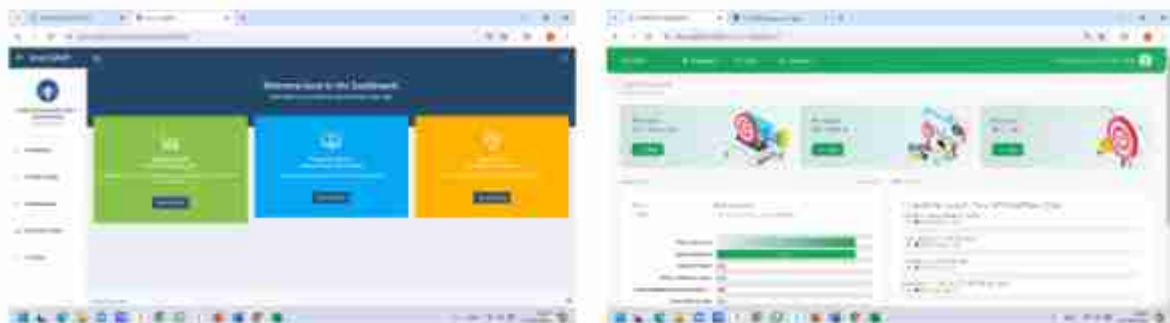
Faktor Penghambat :

- a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja masih belum menantang sehingga perlu dilakukan Analisa Penetapan target kinerja,
- b. Dokumen laporan kinerja dinilai belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Secara umum kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dinilai telah berhasil mencapai target yang didukung dengan Melakukan kegiatan terkait penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembuatan laporan kinerja dan Kegiatan pengelolaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.



Gambar 3.1 : Asistensi Pohon Kinerja, Perbaikan IKU dan PK





Gambar 3.2 : Pemanfaatan Aplikasi E-SAKIP dan Monev Rencana Aksi

3.1.2 Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah”

Sasaran kinerja Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	a. Kualifikasi Pendidikan = 25 b. Kompetensi Pegawai = 40 c. Kinerja Pegawai = 30 d. Hukuman Disiplin = 5

Sumber : PERMENPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018

Penetapan bobot Penilaian Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah diatas berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalisme ASN dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2024 Dinas Kominfo memperoleh Nilai 76,87 poin dari target 55 poin yang ditetapkan dengan capaian 139,76% dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Indeks ini diperoleh melalui Aplikasi Padaringan Tapin berbasis android dan desktop untuk semua pegawai yang merupakan penerapan sistem merit terhadap penilaian kinerja dan profesionalitas pegawai melalui 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi jenjang Pendidikan, Kompetensi Pegawai, Kinerja Pegawai, dan Disiplin Pegawai dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Komponen Penilaian Sasaran 2

Dimensi		Bobot Indikator	Nilai
a	Kualifikasi Pendidikan	25	20,75
b	Kompetensi Pegawai	40	26,12
c	Kinerja Pegawai	30	25
d	Hukuman Disiplin	5	5
Nilai Profesionalisme ASN		100	76,87
Tingkat Profesionalisme ASN			Sedang

Sumber : Monev Rencana Aksi Dinas Kominfo Tahun 2024

Pada Dimensi Kualifikasi dilihat berdasarkan jenjang Pendidikan dengan komposisi jumlah pegawai yaitu 3 orang Pascasarjana, 16 orang Sarjana, 1 orang Diploma dan 2 orang SMA. Dengan rata-rata nilai 20,75 poin atau sebagian besar pegawai pada Dinas Kominfo adalah Sarjana S1. Jika dilihat Jabatan berdasarkan jenjang kualifikasi pendidikan ini dimana pada jabatan pimpinan tinggi/Eselon II saat ini dijabat oleh lulusan S2, pada jabatan Administrator untuk eselon IIIA/Sekretaris dijabat oleh lulusan S2, sementara untuk eselon IIIB/Kepala Bidang dijabat oleh lulusan S1. Pada jabatan pengawas rata-rata dijabat oleh S1, kemudian pada jabatan Pelaksana/Fungsional sebagian besar adalah S1 dan lainnya Diploma. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian professional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

Untuk Dimensi Kompetensi maksimal bobot penilaian adalah 40 poin dibagi menjadi 22,5 poin diklat teknis dan 17,5 poin seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya. Untuk Dinas kominfo rata-rata nilai 26,12 poin atau sebagian besar mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya, meskipun demikian beberapa pegawai pernah mengikuti diklat teknis namun masa berlaku sertifikat yang dimiliki telah lebih dari 2 tahun, sehingga penilaiannya tidak diperhitungkan. Idealnya Diklat teknis ini dapat diikuti setiap tahun oleh setiap pegawai. Pengembangan

kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

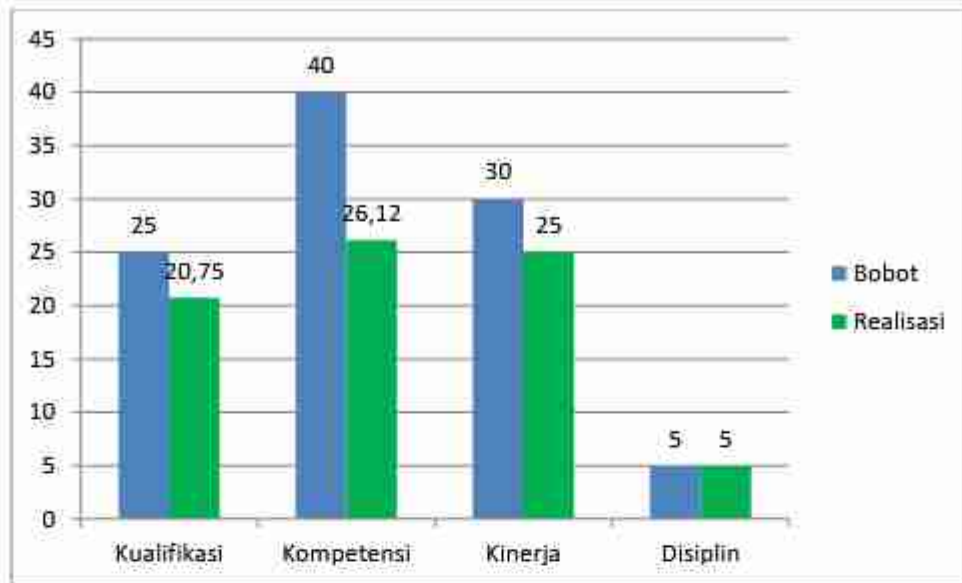
Pada Dimensi Kinerja dilihat berdasarkan riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot masing-masing 60% dan 40% (PP Nomor 46 Tahun 2011). Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Untuk Dinas Kominfo rata-rata nilai 25 poin atau sebagian besar pegawai berkinerja baik. Hasil ini didapat dari pelaporan kinerja individu pada aplikasi eKinerja BKN.

Selanjutnya pada Dimensi Disiplin dilihat berdasarkan data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima. Adapun kategori Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, adalah Hukuman Ringan, Hukuman Sedang, dan Hukuman Berat.

- Kategori Hukuman Ringan dengan teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dengan pelanggaran:
- Kategori Hukuman Disiplin Sedang dengan:
 1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan,
 2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan,
 3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
- Kategori Hukuman Disiplin Berat meliputi:
 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,
 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan,
 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pada Dinas kominfo tidak ditemukan riwayat pelanggaran disiplin sehingga nilai keseluruhan pada dimensi ini adalah 5 poin.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan pada grafik capaian penilaian berikut dibawah ini :



Grafik 3.3 Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang Tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, Tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Dearah	N/A	50,2 Poin	55 Poin	76,87 Poin	139,76

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :



Grafik 3.4 Perbandingan Capaian IP-ASN Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2024 untuk Dinas Kominfo memperoleh Nilai 76,87 poin dari target 55 poin yang ditetapkan dengan capaian 139,76%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 53,12% dari 91,27%. Sementara pada tahun 2022 belum dilakukan penilaian. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode 2024-2026 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	% Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Dearah	76,87 Poin	75 Poin	102,49

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Capaian Meningkatnya IP-ASN Perangkat Daerah tahun 2024 memperoleh Nilai 76,87 poin dari target 55 poin yang ditetapkan dengan capaian 139,76%.

Dibandingkan dengan Akhir Renstra Tahun 2026 dengan target 75 poin dengan tingkat kemajuan 102,49%, maka capaian sudah melebihi target.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator IP-ASN Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 2

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	55 Poin	76,87 Poin	139,76%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN dengan capain kinerja >90%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	100%	100%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	41%	41,00%	100%
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	100%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	100%	100%

1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	100%
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100%
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%

Sumber : *Money Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024*

Faktor Pendukung Keberhasilan :

- Secara umum IP-ASN Dinas Kominfo berhasil mencapai target melalui update data kompetensi ASN pada aplikasi MyASN,
- Sebagian ASN mengikuti tugas belajar.

Faktor Penghambat :

- Kurangnya minat ASN mengikuti tugas belajar,
- ASN lebih banyak mengikuti peningkatan kompetensi yang bersifat klasikal seperti pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya dari pada diklat teknis.

Secara umum kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dinilai telah berhasil mencapai target yang didukung dengan Melakukan Fasilitasi layanan dan pembinaan kinerja pegawai dan Fasilitasi pelayanan kesekretariatan dan operasional pendukung kepegawaian disamping itu perlu alternatif solusi yang dilakukan dengan mendorong ASN untuk mengikuti tugas belajar, mendorong ASN untuk mengikuti diklat teknis, dan monitoring ASN melakukan update data peningkatan kompetensi.



Gambar 3.3 : Bimtek Penilaian SPIP dan Pengelolaan BMD

3.1.3 Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

Sasaran kinerja Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.13
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Domain 1. Kebijakan SPBE = 13% 2. Tata Kelola SPBE = 25% 3. Manajemen SPBE = 16,5% 4. Layanan SPBE = 45,5%

Sumber : PERMENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

Penetapan bobot Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatas berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman MENPAN-RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Untuk Area penilaian SPBE Kabupaten Tapin Tahun 2024 secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut.

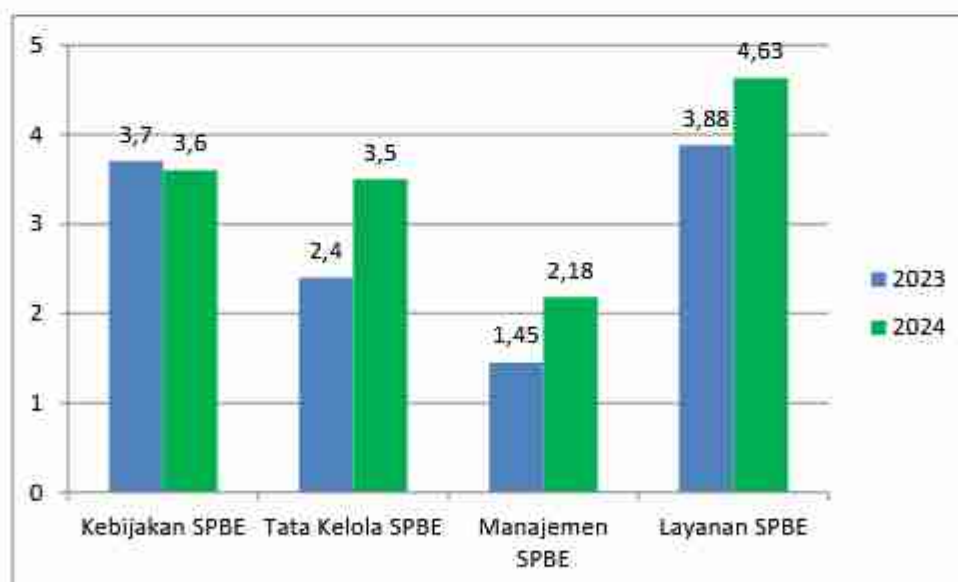
Tabel 3.14 Komponen Penilaian Sasaran 3

SPBE	3,81	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Domain Kebijakan SPBE	3,60	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,60	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Domain Tata Kelola SPBE	3,50	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Perencanaan Strategis SPBE	2,75	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,50	5	< 1,8	Kurang
Penyelenggara SPBE	3,00			
Domain Manajemen SPBE	2,18			
Penerapan Manajemen SPBE	2,63			
Audit TIK	1,00			
Domain Layanan SPBE	4,63			
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,50			
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,83			

Sumber : LHE SPBE Kabupaten Tapin Tahun 2024

Dari target SPBE Kabupaten Tapin pada nilai 3,5 poin terealisasi pada nilai 3,81 poin (Sangat Baik) atau capaian kinerja 108,86 % dengan kategori Sangat Tinggi di tahun 2024 dimana hasil ini sudah melebihi target.

Dari komponen penilaian diatas dapat digambarkan pada grafik capaian penilaian berikut dibawah ini :



Grafik 3.5 Indeks SPBE Kabupaten Tapin

Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 633 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,81 poin dengan predikat Sangat Baik, hasil ini sudah berada diatas target 3,5 poin dengan capaian kinerja 108,86%. Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB tersebut.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapin sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis, Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Peraturan Bupati No 16 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan Arsitektur SPBE, penerapan Layanan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.

Keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan Perencanaan strategis dengan adanya Arsitektur SPBE yang telah direviu, penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, sudah didukung dengan prosedur yang berlaku, dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja serta dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE.

Pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SPSE/LPSE, pemanfaatan layanan dan kearsipan melalui Srikandi, Layanan Akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi ESAKIP sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Pemanfaatan layanan tersebut sudah sangat baik, bahkan untuk beberapa layanan sudah mencapai level optimal.

Penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah memanfaatkan

aplikasi SP4N LAPOR untuk layanan pengaduan pelayanan publik, pemanfaatan JDIH untu Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Namun disisi lain, kebijakan internal peta rencana SPBE belum memuat seluruh muatan peta rencana SPBE, kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE belum mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Rencana dan Anggaran SPBE sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Proses bisnis telah disusun namun belum terlihat adanya perbaikan sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis. Tim koordinasi SPBE telah terbentuk namun tugas/ program kerja belum dilaksanakan seluruhnya. Pelaksanaan Audit belum melaksanakan Audit TIK sesuai pedoman yang berlaku.

Beberapa aspek berikut perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan: Aspek perencanaan strategis SPBE sudah memenuhi, terutama pada rencana dan anggaran SPBE perlu dilakukan reviu dan optimalisasi. Pada aspek penerapan manajemen SPBE perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan audit TIK perlu menjadi perhatian, dalam hal pelaksanaan audit memanfaatkan tools yang disediakan oleh BRIN dan juga bekerjasama dengan BSSN sehingga dengan dilaksanakannya audit TIK dapat memperoleh gambaran kondisi penerapan SPBE. Sehingga pada akhirnya saat pelaksanaan evaluasi selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	2,29 poin	3,09 Poin	3,5 Poin	3,81 Poin	108,86

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :



Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks SPBE

Dari target SPBE Kabupaten Tapin di Level nilai 3,5 poin terealisasi dengan tingkat realisasi 3,81 poin (Sangat Baik) dengan capaian 108,86 % di tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dengan nilai 3,09 poin (Baik) pada target 3 poin dan realisasi tahun 2022 dengan nilai 2,29 poin (Cukup) pada target 3 poin. Capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 terjadi peningkatan masing-masing sebesar 23,3% dari 103% di tahun 2023 dan peningkatan 66,37% dari tahun 2022. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan. Salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sistem pemerintahan era modern saat ini yaitu terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pedoman evaluasi pelaksanaannya diatur dalam Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode 2024-2026 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	% Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	3,81 Poin	3,7 Poin	102,97

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Dari Tabel tersebut, dapat dilihat dari Capaian dari Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Level nilai 3,5 poin terealisasi dengan tingkat realisasi 3,81 poin (Sangat Baik) dengan capaian 108,86 % di tahun 2024. Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2026 dengan nilai 3,7 poin dengan tingkat kemajuan 102,97%, maka capaian ini sudah melebihi target.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi diuraikan sebagai berikut:

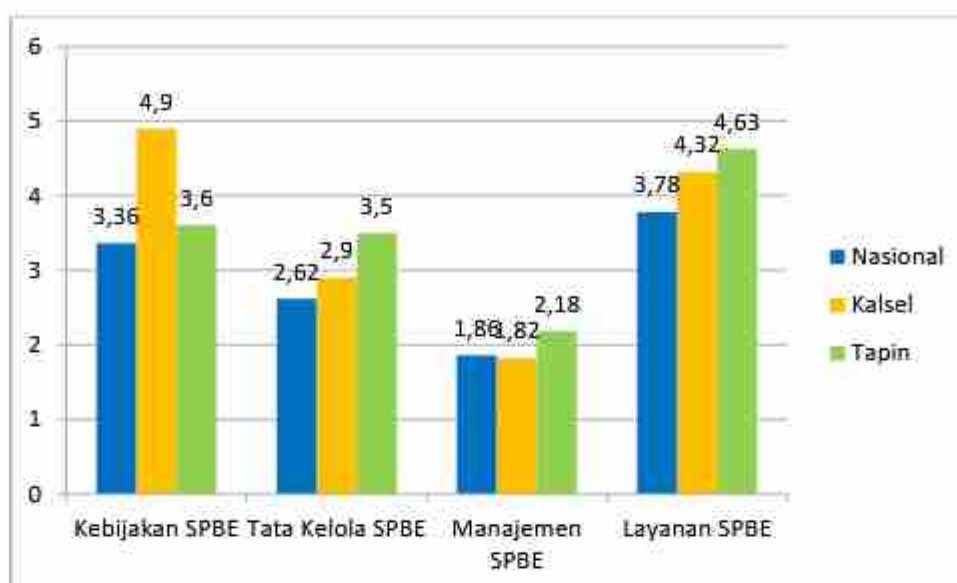
Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Sasaran 3 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi	%Capaian Nasional	%Capaian Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	3,81 Poin	3,12 Poin	3,63 poin	122,11 %	104,95 %

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :

Grafik 3.7 Indeks SPBE Tahun 2024



Sumber: (Data Diolah) LHE SPBE Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE nasional Tahun 2024 mencapai tingkat kematangan 3,12 poin, dimana pada setiap Domain penilaian terlihat bahwa capaian Indeks SPBE Kabupaten Tapin sudah berada diatas Indeks Nasional dengan capaian 122,11% dan hal ini tentunya cukup menggembirakan. Sementara jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE Provinsi Kalsel pada tingkat kematangan 3,63 poin dengan capaian 104,95%, terlihat pada Domain Kebijakan SPBE Provinsi Kalsel lebih unggul. Dimana Pemprov Kalimantan Selatan telah memiliki kebijakan yang mengatur seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE, Sebaliknya pada Kabupaten Tapin, Peta Rencana SPBE belum memuat 7 muatan peta rencana SPBE, serta Kebijakan SPBE belum mengatur seluruh Pembangunan Aplikasi SPBE. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Tapin untuk meningkatkan penilaian pada Domain Kebijakan SPBE ini.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tapin tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 3

No	Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,5 Poin	3,81 Poin	108,86%

	(SPBE)	(SPBE) Kabupaten Tapin			
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	35%	35%	100%
		Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87%	87%	100%
		Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	64%	65,87%	102,93%
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	60%	61,48%	102,47%
		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%	87%	100%
		Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	56%	55,56%	99,21%
		Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	56%	55,56%	99,21%
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	100%
1.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%	74%	100%
		Persentase wifi publik yang disediakan untuk Masyarakat	56%	33,33%	59,52%
		Persentase server sesuai standar	64%	64%	100%
		Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti	74%	74%	100%

		rekomendasi			
		Persentase wifi publik yang sudah terbangun	56%	33,33%	59,52%
		Persentase server yang mampu mengelola database	67%	67%	100%
1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E – Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 Unit	4 Unit	100%
1.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	13 Dokumen	12 Dokumen	92,31%
1.2.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
1.2.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	10 Dokumen	9 Dokumen	90,00%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media social	70%	70%	100%
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	75%	75%	100%
		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%	80%	100%
		Persentase ketersediaan data informasi publik	90%	90%	100%

		yang di sediakan			
		Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional	86%	51,43%	59,8%
		Persentase aduan Masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%	51,43%	59,8%
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	90%	90%	100%
		Persentase jumlah jam tayang	87%	104,97%	120,66%
		Persentase MoU yang diterbitkan	100%	100%	100%
		Persentase PPID pelaksana aktif	91%	91%	100%
		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%	76%	100%
		Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	75%	75%	100%
		Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik	90%	51%	56,67%

		nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)			
2.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
2.1.2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	114 Orang	114 Orang	100%
2.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
2.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	7 Dokumen	5 Dokumen	71,43%
2.1.5	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	4 Layanan	100%
2.1.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,6 Poin	2,63 Poin	101,15%
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	90%	90%	100%
		Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	90%	90%	100%
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	90%	90%	100%
		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	90%	84,55%	93,94%
		Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	60%	60%	100%
		Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Jumlah dokumen proses bisnis statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

		sectoral			
		Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	90%	90%	100%
		Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	50%	50%	100%
		Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	67%	67%	100%
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
3.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	1 Orang	1 Orang	100%
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	75 Orang	75 Orang	100%
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	72%	65,89%	91,52%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%	100%	100%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	50%	50%	100%
4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sandiman yang tersertifikasi	50%	50%	100%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	60%	60%	100%
		Persentase SOP	60%	60%	100%

		Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan			
		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%	50%	100%
		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%	56%	100%
		Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	50%	50%	100%
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	50%	50%	100%
		Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	100%	100%	100%
4.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	100%
4.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik PHKS yang teramankan	33%	33%	100%
		Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%	100%	100%
4.2.1	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Faktor Pendukung Keberhasilan :

- a. Indeks SPBE telah berhasil mencapai target dengan adanya kebijakan Arsitektur SPBE, penerapan Layanan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan,
- b. Terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kabupaten Tapin dan Agen Siber terkait pengamanan data,
- c. Perbaikan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Penyelenggaraan Statistik Sektoral terintegrasi.

Faktor Penghambat :

- a. Lemahnya dukungan perangkat daerah sebagai produsen data dalam pemanfaatan portal Satu Data,
- b. Rendahnya dukungan masyarakat dalam pemanfaatan portal layanan pengaduan.

Secara umum kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai telah berhasil mencapai target yang didukung dengan kegiatan :

1. Konektifitas Jaringan Fiber Optic

Konektifitas Jaringan Fiber Optik meliputi wilayah Perkantoran Setda, Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, Bappelitbang, Mall Pelayanan Publik, BPBD, Satpol PP, Dispustarsip, Dinsos, Bagian PBJ, BAPPENDA, Pendopo Galuh Bastari Tapin, dan 12 Kecamatan. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun diharapkan dengan adanya jaringan ini dapat meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik. Kemudian juga penyediaan server untuk penunjang pelaksanaan TPP ASN untuk aplikasi GOVEM.



Gambar 3.4 : Jaringan Fiber Optic

2. Integrasi Aplikasi Layanan Publik

Layanan Publik yang dikelola Dinas Kominfo yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE ada 16 layanan dari 16 layanan publik atau 100%, yaitu E-SAKIP terintegrasi dengan SIMDA dan PADARINGAN, Web Profile terintegrasi dengan Tapinkab, TPP Online terintegrasi dengan SIMPEG, Tapinkab terintegrasi dengan PORTAL TAPIN, E-TAMASA terintegrasi dengan E-SAKIP dan SIMPEG, TIK terintegrasi dengan SIMPEG, E-OFFICE terintegrasi dengan SIMPEG, SIDAK terintegrasi dengan SIMPEG, Govem terintegrasi dengan Tapinkab, JDih terintegrasi dengan Tapinkab, Tapin Mesra terintegrasi dengan Tapinkab, SIPaT terintegrasi dengan Tapinkab.



Portal Tapin



Govem (Aplikasi TPP)



Padaringan (Layanan Kepegawaian)



e-SAKIP (SAKIP Online)



SapaTapin (Informasi Pegawai)



E-Tapin Mesra (Data Sosial Keluarga)



JDIH (Informasi Produk Hukum)



SIPAT (Informasi Pengawasan APIP)



Web.tapinkab.go.id (Domain)



e-Office

Gambar 3.5 : Aplikasi Layanan Terintegrasi

3. Penyediaan Wifi Publik dan CCTV Kabupaten

Jumlah Wifi Publik yang tersedia saat ini ada 3 titik yang berlokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rantau Baru, Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang berada di Jalan MTQ, dan Lapangan Tenis Putra Tapin. Ketercapaian penyediaan Wifi Publik tahun 2024 tidak terealisasi dari target 6 titik dengan Tingkat capaian 59,52% akibat kurangnya koordinasi mengenai penentuan titik

pemasangan antara Dinas Kominfo, SKPD terkait dan penyedia.

Jumlah CCTV Kabupaten Tapin seluruhnya berjumlah 26 titik yang tersebar pada lokasi berikut :

Tabel 3.19 Lokasi CCTV Publik

No	Lokasi	Jumlah	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Simpang 4 Datu Nuraya (Terminal)	1	2021
2	Simpang 4 Datu Suban (Tugu dua jari)	1	2021
3	Bundaran Rantau Baru	1	2021
4	Bundaran Sirang Pitu	1	2021
5	Lapangan Dwi Dharma	1	2021
6	Bundaran Dulang	1	2021
7	Simpang Transat Binuang	1	2024
8	Simpang 3 RTH	1	2024
9	Simpang 4 Bungur arah PDAM	1	2024
10	Simpang 4 Transat	1	2024
11	Jalan Margasasri Simpang datu Qabul	1	2024
12	Simpang 3 Masjid Lokpaikat	1	2024
13	Simpang 3 Banua Padang	1	2024
14	Perbatasan Tapin Batola	1	2024
15	Simpang 3 Masjid Polres Tapin	1	2024
16	Simpang 3 Pandahan	1	2024
17	Simpang Kecamatan Tapin Selatan	1	2024
18	Tungkap Pintu Masuk Tapin	1	2024
19	Arah Kecamatan Binuang	1	2024
20	Perbatasan Tapin HSS	1	2024
21	Simpang 3 Serawi	1	2024
22	Simpang 3 RSUD Datu Sanggul	1	2024
23	Pos Lintas Margasari	1	2024
24	Jalan Margasai Simpang Balimau	1	2024
25	Bundaran Bungur	1	2024
26	Simpang Jalan Kesehatan	1	2024
	Jumlah	26	

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2024

Pengembangan penyediaan CCTV pada tahun 2024 sebanyak 20 titik pada lokasi 12 Kecamatan (seluruh kecamatan)

4. Monitoring dan Evaluasi SPBE

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

dengan SKPD pengampu SPBE antara lain BKAD, BKPSDM, Bappelitbang, Inspektorat, BPBD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, DPMPTSP, Bagian Barang dan Jasa, Disdukcapil, Disputarsip, dan Dinsos. Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi SPBE dan review Arsitektur SPBE sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah bekerjasama dengan Inxindo Yogyakarta untuk pendampingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi SPBE serta melakukan review Arsitektur SPBE sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam tahapan pendampingan terdapat capaian capaian yang telah dilakukan untuk mendukung penyiapan, pengembangan dan penerapan SPBE di Kabupaten Tapin. Hal ini akan terkorelasi pada peningkatan indeks SPBE yang akan diinput pada penilaian mandiri 2024 ataupun evaluasi umum pada 2025.



Gambar 3.6 : Koordinasi Evaluasi SPBE dan Pendampingan Arsitektur SPBE

Monitoring dan evaluasi SPBE ini sekaligus menjelaskan pentingnya SPBE untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel berbasis elektronik serta bagaimana peran perangkat daerah dalam pengembangan SPBE. Digitalisasi pemerintahan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga memberikan kepuasan terhadap publik yang menerima layanan pemerintahan secara umum.

5. Layanan Konten Berita

Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui konten berita media facebook, Instagram, dan laman tapinkab.go.id. Kemudian juga melakukan kampanye Nasional Pencegahan Stunting melalui pembuatan video edukasi pencegahan stunting sebanyak 10 kegiatan, publikasi pencegahan stunting melalui media elektronik (I News TV dan Tapin TV) serta media sosial Youtube, penyebaran spanduk/baliho, leaflet dan stiker pencegahan stunting pada setiap puskesmas kepada kader posyandu. Adapun rekapitulasi berita media online Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rekap Berita Media Online Tahun 2024

No.	Bulan	Ig	Fb	Website	Kerjasama Media Online	Jumlah	Tapin Tv
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Januari	60	58	45	100	263	1192
2	Februari	60	64	69	100	293	1131
3	Maret	72	72	62	100	306	888
4	April	108	111	83	100	402	851
5	Mei	78	73	48	100	299	1169
6	Juni	66	40	39	100	245	1114
7	Juli	79	80	47	100	306	1425
8	Agustus	66	78	42	100	286	1231
9	September	41	53	54	100	248	766
10	Oktober	60	64	211	100	435	1129
11	November	63	64	85	110	322	0
12	Desember	42	48	67	110	267	0
	Jumlah	795	805	852	1220	3672	10896

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2024



Gambar 3.7 : Konten Berita Pada Media Facebook Dan Instagram



Gambar 3.8 : Konten Berita Pada Media Elektronik Online

6. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas melalui pembinaan pada 7 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk yaitu KIM Mulia Sehati di desa Budi Mulya, KIM Warto Sae di desa Puncak Harapan, KIM Karya Mandiri di desa Jingah Babaris, KIM Sumber Mutiara di desa Ketapang Kecamatan Bakarangan, KIM Pudarta di desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. KIM Habar Kampoeng di desa Gunung Batu. KIM Bina Bakti di desa Timbaan.



Gambar 3.9 : Fasilitas Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

7. Kerjasama Layanan Hubungan Media

Kerjasama Layanan Hubungan Media melalui pembuatan video promosi daerah, Kerjasama Publikasi Pemberitaan dengan LPPL Tapin TV, Kerjasama Publikasi/Kehumasan dengan Media Elektronik Online, dan Kerjasama Publikasi/Kehumasan dengan Media Cetak Lainnya. Adapun kerjasama layanan media Dinas Kominfo pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Kerjasama Layanan Hubungan Media

No	Kerja Sama	Nama Media	Nomor	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Publikasi Pemberitaan	Majalah Detektif	400.10.9/002.b/Mou/ Diskominfo/I/2024	4/1/2024
2	Publikasi Pemberitaan	Mata Banua	400.10.9/002.f/Mou/ Diskominfo/I/2024	4/1/2024
3	Publikasi Pemberitaan	Lentera Kalimantan	400.10.9/002.e/Mou/ Diskominfo/I/2024	4/1/2024
4	Publikasi Pemberitaan	Tampirai	400.10.9/002.a/Mou/ Diskominfo/I/2024	4/1/2024
5	Publikasi Pemberitaan	Pojok Digital Banua	400.10.9/002.c/Mou/ Diskominfo/I/2024	4/1/2024
6	Publikasi Pemberitaan	Poros Kalimantan	400.10.9/002.c/Mou/ Diskominfo/I/2024	5/1/2024
7	Publikasi Pemberitaan	Radar Banjarmasin	400.10.9/002.d/Mou/ Diskominfo/I/2024	5/1/2024
8	Publikasi Pemberitaan	Kabar Daerah	400.10.9/002.d/Mou/ Diskominfo/I/2024	5/1/2024
9	Publikasi Pemberitaan	Kalsel Post	400.10.9/002.b/Mou/ Diskominfo/I/2024	5/1/2024
10	Publikasi Pemberitaan	Bakabar.com	400.10.9/002.e/Mou/ Diskominfo/I/2024	5/1/2024
11	Publikasi Pemberitaan	Narasi Publik.net	400.12.13/199.a/Mo u/Diskominfo/VIII/20 24	21/8/2024
12	Publikasi Kampanye Nasional Pencegahan Stunting	Tapin TV	400.10.9/160.c/Mou/ Diskominfo/VI/2024	25/6/2024

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2024

8. Sosialisasi Penyediaan Layanan Aduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)

Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik pada tahun 2024 mendapati 68 aduan yang masuk kedalam portal SP4N LAPOR. Aduan tersebut Sebagian besar terkait jalan, PDAM, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, trantibum dan perlindungan Masyarakat, sarana prasarana infrastruktur lainnya, transportasi, ASN, pasar, transportasi dan lainnya. Adapun rekapitulasi aduan di Aplikasi LAPOR berdasarkan kecamatan tahun 2024 :

Tabel 3.22

Rekapitulasi Aduan Di Aplikasi LAPOR Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumah
(1)	(2)	(3)
1	Binuang	1
2	Hatungun	1
3	Tapin Selatan	2
4	Salam Babaris	-
5	Tapin Tengah	2
6	Bungur	1
7	Piani	-
8	Lokpaikat	5
9	Tapin Utara	12
10	Bakarangan	1
11	Candi Laras Selatan	-
12	Candi Laras Utara	3
13	Luar Kabupaten	1
14	Tanpa Keterangan	39
	Jumlah	68

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2024

Jika dikaitkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 56,67% maka hasil ini masih jauh dari target 90%. Hal ini dapat diakibatkan oleh dua faktor yang pertama kurangnya sosialisasi mengenai adanya portal layanan SP4N LAPOR oleh Dinas Kominfo kepada masyarakat, yang kedua yaitu kurang minat masyarakat dalam pemanfaatan portal layanan pengaduan SP4N LAPOR karena dirasa identitas pelapor akan dapat diketahui. Menindaklanjuti permasalahan ini maka Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi dan monitoring SP4N LAPOR di 12 Kecamatan (semua kecamatan).





Gambar 3.10 : Sosialisasi dan Monitoring SP4N LAPOR!

9. Penyediaan Data Informasi Publik

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik yaitu Persentase wilayah yang menerima penyebarluasan informasi melalui kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dimana tugas Pengelola PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu, dengan capaian kinerja 71,43% dari target 7 Dokumen dan terealisasi 5 Dokumen. Dari capaian tersebut ada kegiatan yang tidak terealisasi yaitu terkait perbaikan dan pemeliharaan Videotron. Perlu diketahui Videotron yang dimiliki Dinas Kominfo merupakan pengalihan status dari Sekretariat Daerah yang proses pemindahannya mendekati akhir tahun, keterbatasan waktu menjadi kendala dan juga penyedia/pihak ketiga belum ada yang mampu secara teknis melakukan perbaikan, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat direalisasikan, meskipun begitu perbaikan ini akan direalisasikan pada tahun anggaran selanjutnya.



Gambar 3.11 : Layanan Informasi Publik

10. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)

Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah, yang dilakukan oleh BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri. Berdasarkan Hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah 2,63 dengan predikat "Baik". Rincian hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23 Nilai Indeks Pembangunan Statistik

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip SDI	28%	2,6	2,43	2,25
Kualitas Data	24%	2,6	2,27	3,00
Proses Bisnis Statistik	19%	2,6	2,47	3,00
Kelembagaan	17%	2,6	2,32	2,74
Statistik Nasional	12%	2,6	2,20	2,01
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,6	2,35	2,63

Sumber : LHP EPSS Tahun 2024

Dimana pada hasil tersebut pemenuhan atas kualitas data dan standar proses bisnis statistik sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah selaku produsen data, namun belum ada dokumen metadata variable dan indikator dari masing-masing kegiatan statistik sektoral, penerapan kelembagaan statistik juga belum maksimal sehingga perlu menerapkan kolaborasi dan kegiatan bersama-sama, dan dalam kaitan dengan statistik nasional lokus hanya memiliki rancangan kegiatan statistik belum sampai ke tahap pengajuan rekomendasi statistik melalui aplikasi ROMANTIK untuk mendapatkan surat rekomendasi kegiatan statistik.

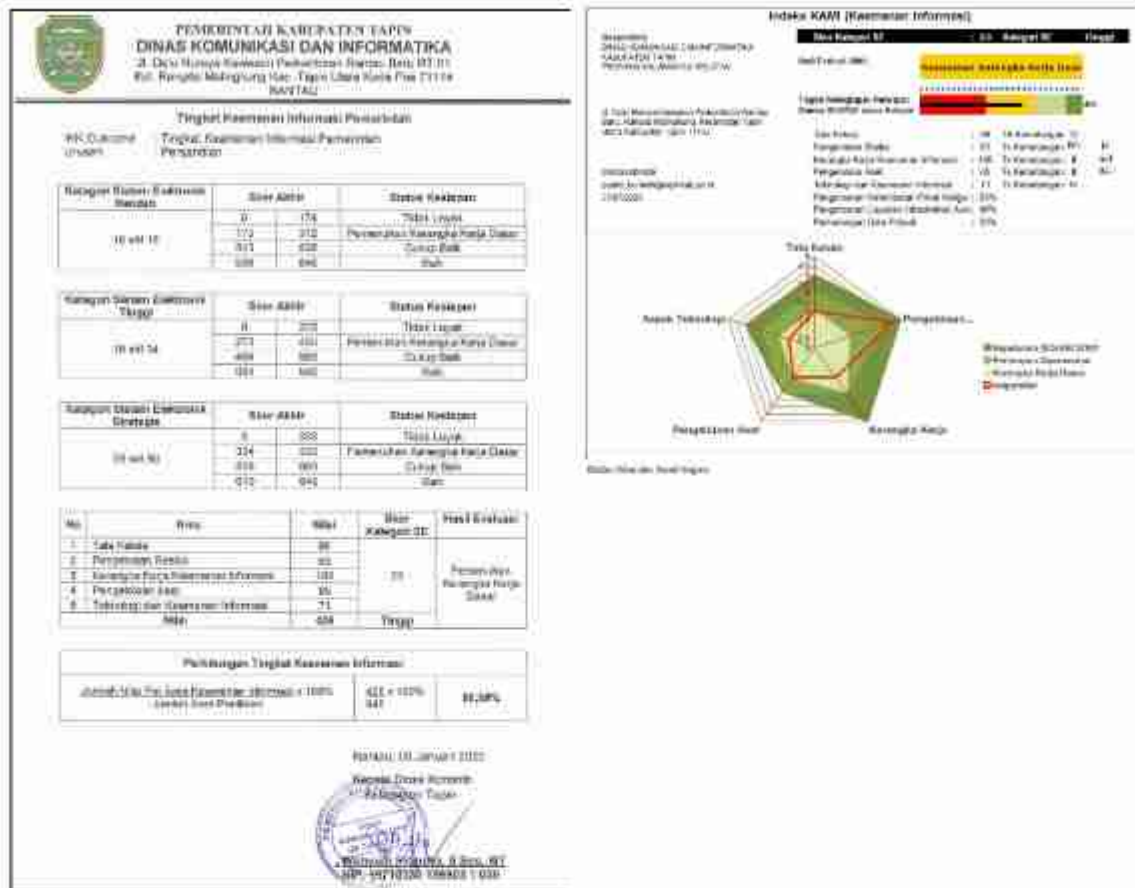
Dari kelemahan-kelemahan tersebut Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral yang merupakan bagian dari renana aksi statistik sektoral yaitu kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diikuti oleh BPS, Bappelitbang, Dinas Kominfo, dan lokus perangkat daerah.



Gambar 3.12 : Kegiatan Monev EPSS

11. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah berdasarkan Indeks KAMI pada 5 area Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi saat ini menunjukan pada indeks nilai 425 dari 645 dengan capaian 65,89%.



Gambar 3.13 : Indeks KAMI

Dalam upaya perbaikan Tatakelola Keamanan Informasi Dinas kominfo melaksanakan kegiatan terkait penyusunan kebijakan pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dan Agen Siber untuk pengamanan data di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin. Pada pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Dinas kominfo membuat SOP pengelolaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Pada Kerangka Kerja Keamanan Informasi telah dibuat kebijakan yang mengatur mekanisme teknis terkait Disaster Recovery Plan.

Tabel 3.24 Kebijakan Keamanan Informasi

No	Nama Kebijakan	Nomor	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten Tapin	188.45/250/KUM/2023	21/11/2023
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	100.3.3.2/163/KUM/2024	20/6/2024
3	SOP Disaster Recovery Plan	000.8.3.3/272/Diskominfo/2023	14/8/2023

4	SOP Pengelolaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi	000.8.3.3/264/Diskominfo/2023	14/8/2023
5	SOP Indeks Keamanan Informasi	000.8.3.3/271/Diskominfo/2023	14/8/2023

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2024



Gambar 3.14 : Launching CSIRT Kabupaten Tapin

12. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Perangkat Daerah yang telah menggunakan TTE sebanyak 54 Perangkat Daerah, artinya semua Perangkat Daerah sudah memanfaatkan TTE atau Capaian kinerja 100%. Jumlah pengguna TTE berdasarkan status dan jabatan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Jumlah Pengguna TTE Berdasarkan Status Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sertifikat TTE yang masih aktif	81	82,65%
2	Sertifikat TTE yang belum terbit	-	-
3	Sertifikat TTE yang dicabut	17	17,35%
	Total	98	100%

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Tabel 3.26
Jumlah Pengguna TTE Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati	1	1,23%
2	Wakil Bupati	-	0%
3	Sekretaris Daerah	1	1,23%
4	Asisten Sekretaris Daerah	3	3,70%
5	Kepala SKPD	33	40,74%

6	Sekretaris SKPD	13	16,05%
7	Camat	12	14,81%
8	Kepala Bidang	4	4,94%
9	Kepala Seksi	8	9,88%
10	Staf/ Fungsional	6	7,41%
	Total	81	100%

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Pada Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Kominfo pada tahun ini juga melaksanakan Bimbingan teknis penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Perangkat Daerah.



Gambar 3.15 : Bimbingan Teknis TTE

Tabel 3.27
Kertas Kerja Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	3,5 Poin	3,81 Poin	108,86%	+ Secara umum Indeks SPBE telah berhasil mencapai target dengan adanya kebijakan Arsitektur SPBE, penerapan Layanan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. + Terbentuknya CSIRT + Perbaikan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - lemahnya dukungan perangkat daerah sebagai produsen data dalam pemanfaatan portal Satu Data - rendahnya dukungan masyarakat dalam pemanfaatan portal layanan pengaduan	1. Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi SPBE 2. Melakukan review Arsitektur SPBE sesuai dengan prosedur yang berlaku 3. Pengintegrasian aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan layanan dan kearsipan, Layanan Akuntabilitas kinerja. 4. Sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR 5. Koordinasi perangkat daerah dalam pemanfaatan portal Satu Data 6. Meningkatkan pengamanan informasi melalui jaring komunikasi sandi, sosialisasi penggunaan internet sehat.

Sumber : (Data Diolah) Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

3.2. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi atas penggunaan sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menggunakan rumus berikut ini :

$$efisiensi = \frac{((pagu\ anggaran \times capaian\ kinerja) - realisasi\ anggaran)}{pagu\ anggaran \times capaian\ kinerja} \times 100\%$$

Jika nilai persentase capaian anggaran lebih rendah dari capaian kinerja yang diperoleh, maka dapat dianggap bahwa anggaran tersebut efektif terhadap pencapaian kinerja. Dan jika nilai persentase efisiensi lebih tinggi dari persentase capaian anggaran, maka dapat dianggap bahwa anggaran tersebut efisien terhadap pencapaian kinerja. Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76 Poin	79,05 Poin	104,01	3.482.161.115	3.346.544.836	96,11	99,08
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	55 Poin	76,87 Poin	139,76	4.180.310.516	3.589.584.953	85,87	99,39
3	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5 Poin	3,81 Poin	108,86	12.643.469.851	11.900.606.479	94,12	99,14
Jumlah/rata-rata				117,54	20.305.941.482	18.836.736.268	92,76	99,21

Sumber : (Data Diolah) Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 117,54% dan capaian anggaran 92,76% dengan efisiensi 99,21%, telah efektif dan efisien terhadap pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan program/kegiatan/ dan sub kegiatan dalam berikut :

Tabel 3.29
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3*100	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.662.471.631	6.936.129.789	90,52	722.421.842
1.1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.600.000	18.260.400	98,17	339.600
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.000	12.448.000	98,79	152.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	5.812.400	96,87	187.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.463.561.115	3.328.284.436	96,09	135.276.679
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.404.404.794	2.942.040.331	86,42	135.276.679
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100	0
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	100	0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.115.225.294	1.842.024.296	87,08	269.280.998
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.635.800	52.595.200	99,92	40.600
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	339.014.394	284.087.400	83,80	54.926.994
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.010.100	49.632.000	99,24	378.100
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	13.639.600	68,20	6.360.400
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.653.565.000	1.442.070.096	87,21	207.574.904
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.134.939.288	1.068.537.000	94,15	66.402.288

1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1.134.939.288	1.068.537.000	94,15	66.402.288
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.929.464	446.265.712	82,81	92.663.752
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.713.144	209.400.752	71,29	84.312.392
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.216.320	236.864.960	96,59	8.351.360
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.662.471.631	6.936.129.789	90,52	158.458.525
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.160.700	60.087.945	74,96	20.072.755
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.131.030	18.125.000	72,12	7.006.030
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	285.924.740	154.545.000	54,05	131.379.740
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.351.256.696	2.210.892.230	94,03	140.364.466
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	2.351.256.696	2.210.892.230	94,03	140.364.466
2.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	214.801.600	206.235.539	96,01	8.566.061
2.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	408.146.892	393.348.275	96,37	14.798.617
2.1.3	Pelayanan Informasi Publik	170.881.104	58.020.000	33,95	112.861.104
2.1.4	Layanan Hubungan Media	1.520.519.200	1.520.275.400	99,98	243.800
2.1.5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	12.223.900	11.632.800	95,16	591.100
2.1.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.684.000	21.380.216	86,62	3.303.784
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	9.208.645.023	8.653.751.048	93,97	554.893.975
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	3.228.973.817	3.170.112.000	98,18	58.861.817

	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.332.287.426	1.330.043.000	99,83	2.244.426
3.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.896.686.391	1.840.069.000	97,01	56.617.391
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.979.671.206	5.483.639.048	91,70	496.032.158
3.2.1	Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.354.400	470.320.000	98,94	5.034.400
3.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	528.210.466	493.249.910	93,38	34.960.556
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.012.136.900	1.692.482.638	84,11	319.654.262
3.2.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.518.850.300	2.440.980.000	96,91	77.870.300
3.2.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	445.119.140	386.605.500	86,85	58.512.640
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	617.564.020	574.276.525	92,99	43.287.495
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	617.564.020	574.276.525	92,99	43.287.495
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	409.328.310	397.178.825	97,03	12.149.485
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu	40.000.000	10.000.000	25,00	30.000.000

	Statistik Daerah yang Terintegrasi				
4.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	168.235.710	167.097.700	99,32	1.138.010
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	466.004.112	461.686.676	99,07	4.317.436
5.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	459.358.512	455.276.676	99,11	4.081.836
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	236.150.912	234.510.600	99,31	1.640.312
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	223.207.600	220.766.076	98,91	2.441.524
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	6.645.600	6.410.000	96,45	235.600
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.645.600	6.410.000	96,45	235.600
JUMLAH		20.305.941.482	18.836.736.268	92,78	1.465.285.214

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Dari tabel diatas terdiri atas 5 (lima) program dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Secara keseluruhan total anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yaitu sebesar Rp. 20.305.941.482,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.836.736.268,- atau 92,78% yang terealisasi dengan kategori capaian Sangat Tinggi sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien sebesar Rp. 1.465.285.214,- dengan tingkat efisiensi anggaran 7,22%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang perlu diantisipasi adalah perlu nya dukungan sumber daya manusia yang kompeten khususnya dibidang IT yang berstatus ASN, terbatas nya infrastruktur teknologi informasi, lemahnya komitmen perangkat daerah dalam implementasi SPBE secara keseluruhan, lemahnya dukungan perangkat daerah sebagai produsen data dalam pemanfaatan portal Satu Data, rendahnya dukungan masyarakat dalam pemanfaatan portal layanan pengaduan, rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menerima dan menyebarluaskan informasi terkait program dan kebijakan pembangunan daerah.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga sangat

memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi SPBE sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Tapin.

- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT.
- 3) Meningkatkan pengamanan informasi melalui jaring komunikasi sandi, sosialisasi penggunaan internet sehat dan pengawasan serta pengendalian komunikasi dan informatika.
- 4) Meningkatkan koordinasi perangkat daerah dalam pemanfaatan portal Satu Data.
- 5) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, serta pelatihan bidang teknologi informasi baik di lingkup internal maupun masyarakat.
- 6) Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan Masyarakat
- 7) Meningkatkan komitmen bersama pada semua tingkatan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rantau, 15 Februari 2025
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin



Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

LAMPIRAN

LHE AKIP TAHUN 2023



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 22 Rantau

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 700.1.2.1/037/Evaluasi.SAKIP/Wil.I/INSP/III/2024

Tanggal 27 Maret 2024

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700.1.2.1/037/Evaluasi
SAKIP/WIL.I/INSP/III/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun Anggaran 2023.

Rantau, 27 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Tapin
Di-

Rantau.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin **Sangat Baik (BB)** dengan nilai **79,05**.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	26,10
c. Pelaporan Kinerja	15	11,85
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	79,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang.

2. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 2) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:

Dalam perencanaan kinerja target yang ditetapkan agar lebih menantang.

2. Pelaporan Kinerja

Dalam membuat dokumen laporan kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 2) Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disampaikan, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Inspektur

Unda Absori, SH., MH
NIP.19700722 200501 1 013

Catatan:

Data KKE terlampir.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				YA
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				YA
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				YA
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				YA
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				YA
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				YA
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20	
Kriteria:					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				YA
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				YA
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				YA
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				YA
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				YA
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				YA
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				TIDAK
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				YA
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				YA
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				YA
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				YA
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00	0,375
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				YA
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				YA
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				YA
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				YA
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				YA

6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				YA
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				YA
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				YA
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		26,10	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				YA
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				YA
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				YA
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20	0,57
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				YA
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				YA
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				YA
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				YA
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				YA
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				YA
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				YA
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan	15,00	A	13,50	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				YA
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				YA
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				YA
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				YA
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				YA
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				YA
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				YA
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				YA
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				YA
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				YA
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,85	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				YA
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				YA
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				YA
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				YA

5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				YA
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				YA
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				TIDAK
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian				YA
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				YA
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				YA
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				YA
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				YA
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				YA
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				YA
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				TIDAK
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam	7,50	BB	6,00	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				YA
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				YA
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				YA
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				YA
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				YA
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				YA
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				YA
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		16,50	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50	
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				YA
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				YA
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				YA
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	CC	4,50	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				YA
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				YA
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				YA

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				TIDAK
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan	12,50	CC	7,50	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				YA
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				YA
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				YA
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				TIDAK
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				TIDAK

NILAI

79,05

SK TIM SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Rt. 01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
Rantau

kominfo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 47.a TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan

melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal, 15 September 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tapin,



Wahyudi Pranoto, S.Sos,MT
NIP. 19710130 199903 1 005

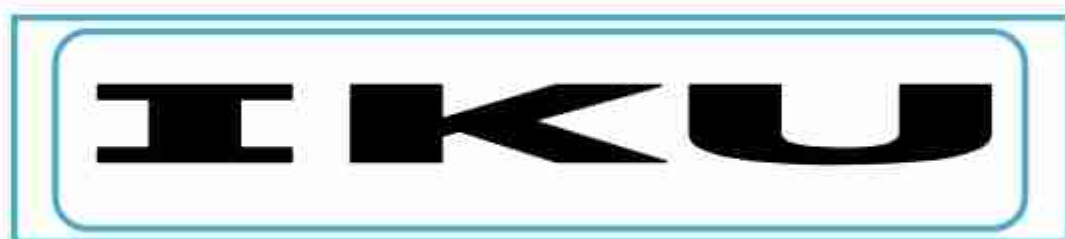
Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tapin
Nomor : 47-2 Tahun 2023
Tanggal : 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
6	Anggota	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
7	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
8	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Anggota	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat
10	Anggota	JFT. Sandiman Ahli Muda
11	Anggota	JFT. Statistisi Ahli Muda
12	Anggota	JFT. Pranata Komputer Ahli Muda
13	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tapin,

Wahyudi Pranoto, S.Sos,MT
NIP. 19710130 199903 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Rt. 01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfotapin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 47.b TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal, 15 September 2023



Kepala Dinas,

Wahyudi Pranoto, S.Sos,MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 47.b Tahun 2023

TANGGAL : 15 September 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Kepala Dinas	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Kepala Dinas	IP-ASN Aplikasi Padaringan Tapin	
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	Level SPBE Kabupaten	Kepala Dinas	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE	

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal, 15 September 2023

Kepala Dinas,



Wahyudi Pranoto, S.Sos.MT
NIP. 19710130 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarifuddin, M.Pd
Jabatan : Pj. Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 15 Februari 2024



Pihak Kedua,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd



Pihak Pertama,

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2024

No (1)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Poin
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	55 Poin
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	3,5 Poin

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.442.855.513	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.336.850.020	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 8.572.080.823	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 719.970.630	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 492.825.902	APBD

Rantau, 15 Februari 2024

Pi. Bupati Tapin,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,85
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,15
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,85
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	15,15
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%

Program
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :
Rp. 11.442.955.513

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Dinas,



Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Sekretaris,



Haris Faridi, S.Sos, M.M
NIP. 19700325 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	90%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	95%

Kegiatan

Anggaran :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 18.600.000

Rantau, 12 Januari 2024

Sekretaris,

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,


Haris Faridi, S.Sos, M.M
NIP. 19700325 199303 1 005


Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Nama Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran :
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.000.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 12.600.000

Rantau, 12 Januari 2024

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan,



Muhammad Ikhsan, SE
NIP. 19881122 201903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Keuangan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

Kegiatan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran :
Rp. 3.143.122.079

Rantau, 12 Januari 2024

Sekretaris,

Haris Kandi, S.Sos, M.M
NIP. 19700325 199303 1 005

Kasubbag Keuangan,

Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
NIP. 19760605 200701 2 040

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Keuangan
Nama Jabatan : Penata Keuangan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/Bulan
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran :
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.137.122.079
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 3.000.000
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 3.000.000

Rantau, 12 Januari 2024

Kasubbag Keuangan,



Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
NIP. 19760605 200701 2 040

Penata Keuangan,



Fathul Jannah, SST
NIP. 19960603 201903 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	41%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%

Kegiatan	Anggaran :
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.911.414.900
2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.932.797.350
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 616.229.164
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 820.792.020

Rantau, 12 Januari 2024


Sekretaris,
Haris Faridi, S.Sos, M.M
NIP. 19700325 199303 1 005


Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
Rika Krisnawati, ST
NIP. 19830828 200701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Nama Jabatan : Staf Umpeg
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	18 Unit
2	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
3	Tersedia nya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12 Paket
4	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
5	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
7	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit
8	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	2 Unit
9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitas	3 Unit

Sub Kegiatan

1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Anggaran : Rp. 4.932.797.350
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 50.010.100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52.635.800
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 291.631.000
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 371.051.724
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.497.138.000
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 80.170.450

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 8 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 25.131.030 |
| 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 715.490.540 |

Rantau, 01 April 2024

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Rika Krisnawati, ST
NIP. 19830828 200701 2 003

Staf bag Umum dan Kepegawaian,

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Nama Jabatan : Arsiparis Terampil
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
2	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan

Sub Kegiatan

- 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2. Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran :

Rp. 245.177.440
Rp. 20.000.000

Rantau, 01 April 2024

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Arsiparis Terampil,



Rika Krisnawati, ST
NIP. 19830828 200701 2 003



Muhammad Khairani, A.Md
NIP. 19900425 202421 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya citra positif atau persepsi positif terhadap kabupaten tapin	Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	70%
2	Terlaksananya Pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM) yang telah dibentuk	Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	75%
3	Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%
4	Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	90%
5	Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional	Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional	86%
		Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%

Program
1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran :
Rp. 2.336.850.020

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Dinas,



Wahyudi Pranoto, S.Sos, M.T
NIP. 19710130 199903 1 005

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S. Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi kerja sama dengan media elektronik Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Persentase jumlah jam tayang	87%
2	Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	75%
3	Terlaksananya verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%

Kegiatan

Anggaran :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 2.151.062.140

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

Fungsional Pranata Hubungan
Masyarakat,



Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja :
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	7 Dokumen
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	114 Orang
3	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran :
1	Pelayanan Informasi Publik	Rp. 148.879.980
2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp. 12.223.900
3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp. 24.684.000

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,


Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya MoU antar stakeholder untuk peningkatan jasa publikasi daerah	Persentase MoU yang diterbitkan	100%
2	Tersedianya konten informasi publik	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	75%
3	Meningkatnya peran PPID pelaksana	Persentase PPID pelaksana aktif	91%
4	Meningkatnya kapasitas admin PPID	Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%

Kegiatan
1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :
Rp. 2.336.850.020

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,


Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Fungsional Pranata Hubungan
Masyarakat,


Riska Hernilda, SP
NIP. 19800517 200604 2 015

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : ---
Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11 Dokumen
2	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	9 Dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran :
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 265.308.230
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 434.334.710

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,


Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Pranata Komputer Ahli Pertama,


Diky Purnomo, S.Kom
NIP. 19861102 202202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : ---
Nama Jabatan : Pengelola TV dan Radio
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan

Sub Kegiatan
1 Layanan Hubungan Media

Anggaran :
Rp. 1.451.419.200

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

Pengelola TV dan Radio,


Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006


Warniati
NIP. 19701014 200604 2 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jaringan intra antar perangkat daerah yang dikelola oleh Diskominfo	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	35%
2	Terintegrasinya pelayanan publik secara online antar perangkat daerah	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87%
3	Berkurangnya wilayah low spot (sinyal lemah)	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	64%

Program
1 Pengelolaan Aplikasi Informatika

Anggaran :
Rp. 8.572.080.823

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Dinas,



Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government



Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan sarana telekomunikasi	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	60%
2	Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi perangkat daerah	Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%
3	Meningkatnya tingkat keaktifan pengelolaan website perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	56%
4	Melakukan monitoring pengelolaan website perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	100%

- Kegiatan :
1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :
Rp. 3.533.973.817

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Penyelenggaraan E-Government,

Jabatan Fungsional Pranata Komputer,



Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas akses internet untuk perangkat daerah	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%
2	Tercukupinya WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat	Persentase WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat	56%
3	Tersedianya server yang sesuai standar	Persentase server sesuai standar	48%
4	Menyampaikan rekomendasi atas hasil survey kualitas akses internet untuk ditindaklanjuti	Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi	74%
5	Menambah WiFi publik	Persentase WiFi publik yang sudah terbangun	56%
6	Menambah Kapasitas Server	Persentase server yang mampu mengelola database	60%

Kegiatan

1. Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :

Rp. 5.038.107,006

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government,

Jabatan Fungsional Pranata Komputer,


Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004


Herlinda, SE
NIP. 19831023 200901 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Nama Jabatan : Pranata Jaringan IPTEK
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	13 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran :
1 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp. 1.178.436.900

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government,



Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

Pranata Jaringan IPTEK,



Muhammad Hikmatullah, A.Md
NIP. 19910907 202202 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Nama Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	11 Dokumen

- Sub Kegiatan
- 1 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Anggaran :
Rp. 2.518.850.300

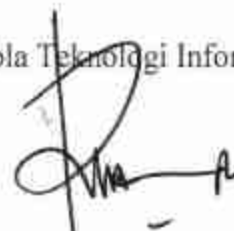
Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government,



Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

Pengelola Teknologi Informasi,



Rudjan Noor
NIP. 19700806 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	10 Dokumen
3	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit

Sub Kegiatan		Anggaran :
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 475.354.400
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp. 387.254.940
3.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.332.287.426
4.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 2.201.686.391

Rantau, 01 April 2024

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government



Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 Unit

Sub Kegiatan

Anggaran :

1 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Rp. 478.210.466

Rantau, 01 April 2024

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government,



Hasran Noor, SE, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

Pranata Komputer Ahli Pertama,



Kamilul Mahmud, S.Kom
NIP. 19920625 202421 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2
2	Memastikan Pengintegrasian Data Statistik Sektorial Satu Pintu	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	90%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	90%
4	Meningkatnya pengamanan sistem elektronik dan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	72%
5	Meningkatnya Tata kelola pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%
6	Meningkatnya Teknologi dan keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	50%

Program	Anggaran :
1 Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Rp. 719.970.630
2 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 492.825.902

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Dinas,

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,

Norbarfina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	4 Orang
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 PD

Sub Kegiatan		Anggaran :
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp. 225.577.910
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 227.180.900

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,



Norbaitina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Statistisi Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	90%
2	Meningkatnya kerja sama dalam pengumpulan data sektoral dari perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	90%
3	Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	60%
4	Tersedianya Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan) untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	1 Aplikasi
5	Tersusunnya Proses Bisnis Statistik Sektoral	Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 Dokumen
6	Terlaksananya MoU dengan produsen data	Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	90%
7	Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	50%
8	Terlaksananya Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	67%

Kegiatan
1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :
Rp. 719.970.630

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,

Statistisi Ahli Muda,


Norbaitina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002


Ubai Dullah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Statistisi Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran :
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 479.392.720

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,


Norbertina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002

Rantau, 12 Januari 2024

Statistisi Ahli Pertama,


Dwi Sigit Wanto, S.Mat
NIP. 19910223 201903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Rp. 15.000.000

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,

Pranata Komputer Ahli Pertama,



Norbaitina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002



Taufiqurrahman, S.Kom
NIP. 19890604 202202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Sandiman
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SDM yang memiliki sertifikasi sandiman	Persentase sandiman yang tersertifikasi	50%
2	Meningkatnya Pengelolaan resiko keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	60%
3	Meningkatnya Kerangka kerja keamanan informasi	Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan	50%
4	Meningkatnya Pengelolaan aset informasi	Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%
5	Terlaksananya bimtek sistem keamanan informasi	Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%
6	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sandiman	Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	50%
7	Optimalnya penggunaan tanda tangan elektronik pada perangkat daerah untuk tata kelola resiko keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	50%
8	Terbentuknya tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menindaklanjuti laporan keamanan informasi	Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%
9	Optimalnya penggunaan pola hubungan komunikasi sandi perangkat daerah	Persentase titik PHKS yang teramankan	33%
10	Terlaksananya monev atas penggunaan TTE pada perangkat daerah	Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	45%
11	Tersusunnya kebijakan daerah tentang PHKS	Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :

Rp. 492.825.902

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,



Norbaitina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002

Jabatan Fungsional Sandiman,



Anthony Irwan Rifani, SH
NIP. 19820121 200803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Sandiman
Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan
2	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 PD

Sub Kegiatan

- 1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 2 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :

Rp. 256.883.002

Rp. 8.762.000

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,



Norbaitina, S.Sos
NIP. 19860411 201402 2 002

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan,



Padelis, A. Md
NIP. 19780103 201101 1 001

MATRIKS RENSTRA



Tabel 6.2
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Rencana Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah / Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021	2022	2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
TUJUAN 1																				
MEMPERKUAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH					Nilai SAPK	70,13 poin	73,35 poin	76,00 poin	Rp 4.737.602.482	73,50 poin	Rp 4.582.285.736	80,00 poin	Rp 4.705.484.736	82,00 poin	Rp 13.630.342.457	82,00 poin	Rp 17.871.719.401	Dikominfo	Kab.Tapin	
	SASARAN 2				Nilai SAPK PERANGKAT DAERAH	70,13 poin	73,35 poin	76,00 poin	Rp 1.486.560.562	73,50 poin	Rp 1.358.061.282	80,00 poin	Rp 1.356.065.262	82,00 poin	Rp 3.381.853.252	82,00 poin	Rp 13.504.350.348	Dikominfo	Kab.Tapin	
				PROGRAM																
			Meningkatnya capaian (AKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,60 poin	23,10 poin	25,80 poin	Rp 1.465.380.262	25,00 poin	Rp 1.338.863.262	25,00 poin	Rp 1.356.065.262	25,10 poin	Rp 5.381.853.252	25,10 poin	Rp 13.504.350.348	Dikominfo	Kab.Tapin	
					Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	21,00 poin	23,70 poin	23,15 poin		23,05 poin		26,05 poin	26,05 poin	26,05 poin	Dikominfo	Kab.Tapin				
					Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	10,75 poin	12,00 poin	11,85 poin		11,85 poin		11,85 poin	12,15 poin	12,15 poin	Dikominfo	Kab.Tapin				
					Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	18,00 poin	16,75 poin	16,15 poin		16,50 poin		16,50 poin	17,00 poin	17,00 poin	Dikominfo	Kab.Tapin				
			Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dikominfo	Kab.Tapin	
				KINERJA																
			Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tidak tercapainya perencanaan kinerja atau rekomendasi dari mitra kerja Kabupaten	100%	100%	100%	Rp 68.922.650	100%	Rp 12.600.000	100%	Rp 12.600.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 114.122.650	Dikominfo	Kab.Tapin	
			Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah		Persentase rekomendasi dari AKIP yang diterima instansi	85%	95%	95%		90%		100%		100%		100%				
					Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		90%		100%		100%		100%				
				SUB KEGIATAN																
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	Dikominfo	Kab.Tapin	
			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 68.922.650	10 Laporan	Rp 12.600.000	10 Laporan	Rp 12.600.000	10 Laporan	Rp 20.000.000	10 Laporan	Rp 114.122.650	Dikominfo	Kab.Tapin	



				KEGIATAN	Perluangkegiatan yang sesuai dengan standar pemerintahan keuangan	100%	100%	98%		99%		100%		100%		100%				
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	Rp 3.397.437.912	Rp 3.345.463.262		Rp 3.345.463.262		Rp 3.381.863.262		Rp 3.345.463.262		Rp 3.345.463.262	Dikeminfo Kab.Tapin	
				UJI KOGNITIF	Jumlah Orang yang Mengetahui Sisi dan Tunjangan ASN	288 Orang/ Bulan	288 Orang/ Bulan	288 Orang/ Bulan	Rp 5.541.863.262	Rp 5.541.863.262		288 Orang/ Bulan	Rp 5.541.863.262	288 Orang/ Bulan	Rp 5.541.863.262		Rp 5.541.863.262		Rp 5.541.863.262	Dikeminfo Kab.Tapin
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 32.273.090	1 Laporan	Rp 2.050.000	2 Laporan	Rp 2.050.000	2 Laporan	Rp 10.000.000	2 Laporan	Rp 46.273.090	Dikeminfo Kab.Tapin		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 25.501.560	1 Laporan	Rp 1.550.000	1 Laporan	Rp 1.550.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 36.401.560	Dikeminfo Kab.Tapin		
				INDUK PROGNOSIS/ALOKASI PERANGKAT DAERAH				15 juta	Rp 1.271.241.820	70 juta	Rp 1.234.226.474	72 juta	Rp 1.347.423.474	75 juta	Rp 10.454.479.235	75 juta	Rp 14.307.349.103	Dikeminfo Kab.Tapin		
				PROGRAM																
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	WIDYANAMA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	100%	100%	Rp 3.271.241.820	100%	Rp 1.234.226.474	100%	Rp 1.317.421.474	100%	Rp 10.454.479.235	100%	Rp 14.307.349.103	Dikeminfo Kab.Tapin		
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dikeminfo Kab.Tapin		
				KEGIATAN	Persentase kepatuhan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	20%	20%	20%	Rp 650.918.028	41%	Rp 630.587.030	54%	Rp 735.587.030	62%	Rp 8.693.000.000	62%	Rp 5.674.847.028	Dikeminfo Kab.Tapin		
				UJI KOGNITIF	Jumlah Paket Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 33.657.800	12 Paket	Rp 45.856.130	12 Paket	Rp 45.856.130	12 Paket	Rp 200.000.000	12 Paket	Rp 324.080.000	Dikeminfo Kab.Tapin		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 185.006.980	12 Paket	Rp 156.401.800	12 Paket	Rp 16.401.800	12 Paket	Rp 1.000.000.000	12 Paket	Rp 1.185.807.780	Dikeminfo Kab.Tapin		
			Tersedianya Barang Cetak dan Pengiriman	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 35.875.700	12 Paket	Rp 30.000.000	12 Paket	Rp 32.000.000	12 Paket	Rp 300.000.000	12 Paket	Rp 425.875.700	Dikeminfo Kab.Tapin		



		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggendan	Persediaan Barang Cetakan dan Penggendan	Jumlah Tiket Barang Cetakan dan Penggendan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp. 95.876.700	12 Paket	Rp. 90.000.000	12 Paket	Rp. 90.000.000	12 Paket	Rp. 90.000.000	12 Paket	Rp. 435.675.239	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Tekniker/tenaga fasilitas kunjungan terlatih/tenaga penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tekniker/tenaga fasilitas kunjungan terlatih/tenaga penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 8.040.549	12 Laporan	Rp. 8.000.000	12 Laporan	Rp. 8.000.000	12 Laporan	Rp. 130.000.000	12 Laporan	Rp. 374.090.549	Dikembangkan	Kab.Tapin
					12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 440.329.000	12 Laporan	Rp. 440.329.000	12 Laporan	Rp. 320.329.000	12 Laporan	Rp. 2.000.000.000	12 Laporan	Rp. 3.434.182.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
			KEGMATAN															
		Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persediaan Jasa Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	Persempo ASN Perangkat Daerah yang Menjalankan Pelaksana Administrasi Kepegawaian dengan	100%	100%	100%	Rp. 540.490.511	100%	Rp. 408.041.211	100%	Rp. 408.041.211	100%	Rp. 7.000.000.000	100%	Rp. 5.146.977.979	Dikembangkan	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN															
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 251.041.241	12 Laporan	Rp. 251.041.241	12 Laporan	Rp. 251.041.241	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.251.125.495	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 129.819.280	12 Laporan	Rp. 127.000.000	12 Laporan	Rp. 127.000.000	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.441.549.280	Dikembangkan	Kab.Tapin
			KEGMATAN															
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (RMB)	Persediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persempo Barang Milik Daerah dalam Kondisi Bak	100%	100%	100%	Rp. 172.577.460	100%	Rp. 118.360.351	100%	Rp. 118.360.351	100%	Rp. 4.000.000.000	100%	Rp. 4.410.515.162	Dikembangkan	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN															
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	11 Unit	Rp. 172.577.460	10 Unit	Rp. 118.360.351	10 Unit	Rp. 118.360.351	10 Unit	Rp. 4.000.000.000	10 Unit	Rp. 4.410.515.162	Dikembangkan	Kab.Tapin
			KEGMATAN															
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (RMB)	Persediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persempo Barang Milik Daerah dalam Kondisi Bak	100%	100%	100%	Rp. 66.895.921	100%	Rp. 72.438.402	100%	Rp. 72.438.402	100%	Rp. 804.470.215	100%	Rp. 1.018.102.940	Dikembangkan	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN															
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp. 43.713.951	3 Unit	Rp. 45.713.951	3 Unit	Rp. 43.713.951	3 Unit	Rp. 70.000.000	3 Unit	Rp. 101.141.676	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp. 3.000.000	3 Unit	Rp. 10.000.000	3 Unit	Rp. 10.000.000	3 Unit	Rp. 100.000.000	3 Unit	Rp. 117.100.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jasa Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persediaan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp. 16.142.020	3 Unit	Rp. 16.715.000	3 Unit	Rp. 16.715.000	3 Unit	Rp. 854.470.255	3 Unit	Rp. 888.051.264	Dikembangkan	Kab.Tapin



TUJUAN 2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERILAHAN INFORMASI ELEKTRONIK					INDEKS SPBE	1,85 poin	2,25 poin	3 poin	Rp 5.734.719.368	3,3 poin	Rp 1.793.570.000	3,6 poin	Rp 1.834.555.082	3,7 poin	Rp 36.729.640.000	3,7 poin	Rp 1.129.689.095	Dikembangkan	Kab.Tapin	
SASARAN 3 MENINGKATKAN INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)					INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN TAPIN	1,85 poin	2,25 poin	3 poin	Rp 5.734.719.368	3,3 poin	Rp 1.793.570.000	3,6 poin	Rp 1.834.555.082	3,7 poin	Rp 36.729.640.000	3,7 poin	Rp 1.129.689.095	Dikembangkan	Kab.Tapin	
				PROGRAM																
			Meningkatnya citra pemerintah sebagai pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab		Rasio kesadaran publik terhadap Kabupaten Tapin di media sosial	-	-	-		70%		75%		80%		80%				
			Tertulisannya kemampuan teknis kelompok informal masyarakat (KIM) yang telah dibina		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	50%	62%	70%		75%		79%		83%		83%				
			Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	100%	100%	100%		80%		90%		100%		100%				
			Meningkatnya kemudahan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PID)		Persentase kemudahan data informasi publik yang di sukutikan	-	-	80%		90%		95%		100%		100%				
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					Rp 1.250.000.000		Rp 1.250.000.000		Rp 1.250.000.000		Rp 1.250.000.000					
			Meningkatnya akses masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pelayanan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengelolaan online rakyat (OPIN Rakyat) yang sesuai dengan target standar nasional		Persentase akses masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pelayanan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengelolaan online rakyat (OPIN Rakyat) yang sesuai dengan target standar nasional	100%	100%	100%		86%		93%		100%		100%		Rp 6.336.546.900	Dikembangkan	Kab.Tapin
					Persentase akses masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pelayanan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengelolaan online rakyat (OPIN Rakyat)	100%	100%	100%		90%		95%		100%		100%				
				AKTIVITAS																
			Tersedianya konten informasi publik		Persentase jumlah konten yang diupload	-	-	-		75%		83%		100%		100%		Rp 41.479.016.900	Dikembangkan	Kab.Tapin



			PROGRAM															
		Meningkatnya citra positif atau persepsi positif terhadap kabupaten tapin	PROGRAM PENGLOKALISASIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Basik sentiment publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	-	-	-	75%		75%		80%		80%				
		Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok informal masyarakat (KIM) yang telah dibentuk		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk	90%	82%	70%	75%		79%		81%		81%				
		Terpenuhinya jasa publikasi terbit daerah		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	100%	100%	100%	80%		90%		100%		100%				
		Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui jejaring pengkaji informasi dan dokumentasi (PPIID)		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan			80%	80%		95%		100%		100%				
		Meningkatnya akses masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional		Persentase akses masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi (SMAH (Apas) yang sesuai dengan target standar nasional	100%	100%	100%	80%		93%		100%		100%				
		pengaduan online rakyat (SPAR) Laporan yang sesuai dengan target standar nasional		Persentase akses masyarakat terverifikasi yang report time smul ditindak lanjut pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi (SMAH (Apas)	100%	100%	100%	90%		95%		100%		100%			Rp 5.135.540.000	Diskominfo Kab.Tapin
			KEGIATAN															
		Tersebitnya konten informasi publik		Persentase jumlah konten yang dibayangkan	-	-	-	75%		83%		100%		100%			Rp 61.475.816.900	Diskominfo Kab.Tapin
		Digitalisasi kerja sama dengan media elektronik Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)		Persentase jumlah jam tayang	100%	100%	100%	87%		92%		100%		100%			Rp 57.295.136.740	Diskominfo Kab.Tapin
		Terlaksananya MUI atau stakeholder untuk peningkatan jasa publikasi daerah		Persentase MUI yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%			Rp 26.508.084.790	Diskominfo Kab.Tapin
		Meningkatnya peran PPIO pelaksana		Persentase PPIO pelaksana aktif	-	-	70%	81%		87%		100%		100%			Rp 11.122.177.580	Diskominfo Kab.Tapin



		Meningkatnya kapasitas admin PPD	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase admin PPD yang dibekali keterampilan	-	-	70%	Rp 1.259.046.700	88%	Rp 1.258.748.800	88%	Rp 1.258.748.800	97%	Rp 1.490.000.000	97%	Rp 13.878.576.280	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Terlaksananya sosialisasi dan penguatan aplikasi sistem pengelolaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengaduan online rakyat (SPAR Lapor)		Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan penguatan aplikasi sistem pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengaduan online rakyat (SPAR Lapor)	-	-	100%		75%		88%		100%		100%	Rp 5.917.830.480	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Terlaksananya verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengaduan online rakyat (SPAR Lapor)		Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengaduan online rakyat (SPAR Lapor)	100%	100%	100%		98%		95%		100%		100%	Rp 6.216.548.880	Dikembangkan	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN															
		Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	11 Dokumen	Rp 47.803.200	11 Dokumen	Rp 48.300.000	11 Dokumen	Rp 48.300.000	12 Dokumen	Rp 180.000.000	12 Dokumen	Rp 814.207.260	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	Rp 51.108.000	9 Dokumen	Rp 51.798.000	9 Dokumen	Rp 51.798.000	10 Dokumen	Rp 180.000.000	10 Dokumen	Rp 515.139.880	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	7 Dokumen	Rp 28.570.000	7 Dokumen	Rp 28.870.000	7 Dokumen	Rp 29.430.000	8 Dokumen	Rp 100.000.000	8 Dokumen	Rp 288.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Tersedianya Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	Rp 1.097.165.280	4 Layanan	Rp 1.096.482.000	4 Layanan	Rp 1.096.482.000	5 Layanan	Rp 1.100.000.000	5 Layanan	Rp 4.480.029.280	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan	-	-	-	-	114 Orang	-	114 Orang	-	114 Orang	Rp 306.000.000	114 Orang	Rp 300.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
		Terlaksananya Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Pemertahanan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 31.708.220	3 Dokumen	Rp 32.388.880	3 Dokumen	Rp 31.958.800	4 Dokumen	Rp 100.000.000	4 Dokumen	Rp 258.718.820	Dikembangkan	Kab.Tapin
			PROGRAM															
		Meningkatnya Jaringan kerja antar perangkat daerah yang dikelola oleh Disdikinfo		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan kerja yang dikelola oleh Disdikinfo	-	-	10%		30%		38%		60%		60%			
		Berkurangnya wilayah low spot (sinyal lemah)	PROGRAM PENGELOLAAN APUNGSI INFORMATIKA	Persentase desa / kecamatan bebas low spot (sinyal lemah)	-	54%	88%	Rp 1.308.753.172	64%	Rp 128.655.400	88%	Rp 389.626.482	67%	Rp 33.519.640.000	67%			



			Terintegrasi layanan publik secara online antar perangkat daerah		Persentase Pelayanan publik yang diintegrasikan secara online dan terintegrasi	38%	58%	80%		87%		98%		100%		100%	Rp 36.776.753,054	Dikomitir	Kab.Tapin
				AKSI/ATK/ATK															
			Peningkatan sarana telekomunikasi		Persentase desa / kelurahan yang terlayani sarana telekomunikasi		50%	50%		60%		61%		61%		63%	Rp 26.707.615,517	Dikomitir	Kab.Tapin
			Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi perangkat daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	38%	58%	80%		87%		92%		100%		100%	Rp 10.892.186,530	Dikomitir	Kab.Tapin
			Meningkatkan tingkat kualitas pengelolaan website perangkat daerah		Persentase perangkat daerah yang sudah pengelolaan website	-	-	54%		56%		73%		100%		100%	Rp 8.815.429,082	Dikomitir	Kab.Tapin
			Melakukan monitoring pengelolaan website perangkat daerah		Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	-	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Rp 19.892.186,530	Dikomitir	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Penasteksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemasteksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen: Penasteksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	4 Dokumen	5 Dokumen	Rp 818.846,000	5 Dokumen	Rp 127.880,000	5 Dokumen	Rp 176.580,000	10 Dokumen	Rp 2.200.846,000	10 Dokumen	Rp 4.825.428,082	Dikomitir	Kab.Tapin
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	-	-	7 Unit	Rp 796.257,448	18 Unit	Rp 120.000,000	21 Unit	Rp 120.000,000	35 Unit	Rp 10.000.000,000	35 Unit	Rp 11.036.757,448	Dikomitir	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya kualitas akses internet publik perangkat daerah		Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	67%	67%	78%		74%		78%		81%		81%	Rp22.519.160,157	Dikomitir	Kab.Tapin
			Tersedianya Wi-Fi publik yang disediakan untuk masyarakat		Persentase wi-fi publik yang disediakan untuk masyarakat	17%	17%	31%		36%		78%		100%		100%	Rp 75.478.810,870	Dikomitir	Kab.Tapin



			Terselenggara server yang sesuai standar	Pengelolaan P-governance di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Vol	Persentase server sesuai standar	-	32%	32%		48%		94%		80%		80%	Rp. 48.740.249.262	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Menyempatkan rekomendasi atas hasil survey kualitas akses internet untuk ditindaklanjuti		Persentase perangkat daerah yang memiliki tingkat rekomendasi	67%	67%	70%	Rp. 802.244.724	74%	Rp. 120.854.400	78%	Rp. 170.355.400	81%	Rp. 14.800.000.000	81%	Rp. 12.718.861.508	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Membantu wifl publik		Persentase wifl publik yang sudah terbangun	99%	99%	99%		98%		78%		100%		100%	Rp. 16.451.107.654	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Membantu kapasitas server		Persentase server yang mampu mengelola database		70%	40%		60%		80%		100%		100%	Rp. 16.034.266.104	Dikembangkan	Kab.Tapin
SUB KEGIATAN																			
			Tertindaklanjuti Peningkatan dan Pengembangan e-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Vol	Pengelolaan dan Pengembangan E-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Vol	Jumlah Dokumen Hasil Pengalokasian dan Pengalokasian dan Pengembangan P-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Vol	11 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	Rp. 930.372.084	5 Dokumen	Rp. 82.250.000	11 Dokumen	Rp. 82.195.000	10 Dokumen	Rp. 1.000.000.000	10 Dokumen	Rp. 1.715.372.284	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Tertindaklanjuti Pengelolaan Riset Data Pemerintahan	Pengelolaan Riset Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Riset Data Pemerintahan yang dikelola	-	-	-	Rp. -	-	Rp. -	-	Rp. -	7 Unit	Rp. 10.000.000.000	7 Unit	Rp. 10.000.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Tertindaklanjuti Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	-	-	-	Rp. -	-	Rp. -	-	Rp. -	1 Dokumen	Rp. 700.000.000	1 Dokumen	Rp. 700.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Tertindaklanjuti Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	Rp. -	4 Unit	Rp. -	4 Unit	Rp. -	100 Unit	Rp. 2.000.000.000	100 Unit	Rp. 2.000.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Tertindaklanjuti Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Vol Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Vol Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program model yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp. 75.889.200	13 Dokumen	Rp. 30.350.000	13 Dokumen	Rp. 30.350.000	13 Dokumen	Rp. 100.000.000	13 Dokumen	Rp. 449.510.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Tertindaklanjuti Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	Rp. 158.721.770	11 Dokumen	Rp. 43.895.400	11 Dokumen	Rp. 43.895.400	12 Dokumen	Rp. 100.000.000	12 Dokumen	Rp. 546.512.570	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Tertindaklanjuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	8 Dokumen	4 Dokumen	10 Dokumen	Rp. 66.448.870	10 Dokumen	Rp. 8.240.000	10 Dokumen	Rp. 8.240.000	11 Dokumen	Rp. 100.000.000	11 Dokumen	Rp. 582.948.870	Dikembangkan	Kab.Tapin

			Meningkatnya nilai Indeks pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	1,8 poin		2,5 poin	2,62 poin		2,63 poin	2,63 poin			Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	PROGRAM PENCEGAHAN STATISIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	-	-	-	Rp. 80.625.300	90%	Rp. 67.117.900	95%	Rp. 67.117.900	100%	Rp. 450.000.000	100%	Rp. 671.865.100	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral		Persentase data statistik sektoral yang diadopsikan tepat waktu	-	-	-	85%	90%	95%	100%	100%	100%				Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya produksi data yang memiliki proses bisnis Statistik Sektoral	KEGIATAN	Persentase produksi data yang memiliki proses bisnis Statistik Sektoral	-	-	-		90%	95	100	10000%	10000%				Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya kerja sama dalam pengumpulan data sektoral dari perangkat daerah		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	-	85%	85%		90%	95%	100%	100%	100%				Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya kapabilitas SIM pemerintah daerah dalam melengkapi data statistik daerah yang terintegrasi		Persentase SIM pemerintah daerah yang memiliki vertikal statistik	-	-	10%		60%	80%	100%	100%	100%				Diskominfo	Kab.Tapin
			Terdapatnya Aplikasi SDAR (Sistem Informasi Data Pemerintahan) untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	-	-	-	Rp. 80.625.300	1 Aplikasi	Rp. 67.117.900		Rp. 67.117.900		Rp. 450.000.000	1 Aplikasi	Rp. 671.865.100	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terdapatnya Proses Bisnis Statistik Sektoral		Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				Diskominfo	Kab.Tapin
			Terdapatnya Model dengan produksi data		Persentase Model yang diterbitkan dari produksi data	-	-	-		90%	95%	100%	100%	100%				Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya perangkat daerah yang memiliki pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistik		Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistik	-	-	90%		90%	100%	100%	100%	100%				Diskominfo	Kab.Tapin
			Terdapatnya Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPS) kepada perangkat daerah		Persentase peserta sosialisasi yang mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPS) kepada perangkat daerah	-	-	90%		97%	98%	99%	99%	99%				Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB NEGATAN															
			Terdapatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	3 Dokumen	8 Dokumen	11 Dokumen	Rp. 80.625.300	11 Dokumen	Rp. 67.117.900	11 Dokumen	Rp. 67.117.900	11 Dokumen	Rp. 300.000.000	11 Dokumen	Rp. 471.865.100	Diskominfo	Kab.Tapin



			Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik	1 Orang	Rp	1 Orang	Rp	2 Orang	Rp	2 Orang	Rp	100.000.000	2 Orang	Rp	100.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik	50 Orang	Rp	75 Orang	Rp	75 Orang	Rp	75 Orang	Rp	110.000.000	75 Orang	Rp	130.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
				PROGRAM														
			Meningkatnya penguasaan sistem keamanan dan informasi														Dikembangkan	Kab.Tapin
			Meningkatnya Tata kelola pengamanan informasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERALATAN UNTUK PENYAMANAN INFORMASI			Rp	77.288.190									Dikembangkan	Kab.Tapin
			Meningkatnya Teknologi dan keamanan informasi														Dikembangkan	Kab.Tapin
				KEGIATAN														
			Meningkatnya SDM yang memiliki sertifikasi sandinan														Dikembangkan	Kab.Tapin
			Meningkatnya Pengelolaan risiko keamanan informasi														Dikembangkan	Kab.Tapin
			Meningkatnya Kelangka kerja keamanan informasi														Dikembangkan	Kab.Tapin
			Meningkatnya Pengelolaan aset informasi														Dikembangkan	Kab.Tapin
			Terlaksananya indeks sistem keamanan informasi	Penyusunan Perencanaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp	77.288.190									Dikembangkan	Kab.Tapin
			Terlaksananya pelatihan dan peatihan serta ujian sertifikasi sandinan														Dikembangkan	Kab.Tapin



		dan perbaikan serta akan dilakukan saat ini		yang akan akan verifikasi	-	-	50%		50%		100%		100%		100%		Diketahui	Kab.Tapin
		Optimalnya penggunaan mode tangan elektronik pada perangkat daerah untuk tata kelola risiko keamanan informasi		Penuntasi perangkat daerah yang menggunakan mode tangan elektronik	-	-	45%		50%		55%		60%		60%		Diketahui	Kab.Tapin
		Pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi dan menangani ancaman keamanan informasi		Penuntasi SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan prosedur			100%		100%		100%		100%		100%		Diketahui	Kab.Tapin
		Terlaksananya monitoring atau pengawasan TTE pada perangkat daerah		Persentase pendataan pengguna mode tangan elektronik	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		Diketahui	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN															
		Tersedianya Keamanan Informasi Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota Sejenis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sejenis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sejenis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	12 Laporan	Rp 77.288.186	12 Laporan	Rp 79.207.900	12 Laporan	Rp 79.207.900	12 Laporan	Rp 100.000.000	12 Laporan	Rp 100.000.000	Diketahui	Kab.Tapin
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	-	54 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	54 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	Diketahui	Kab.Tapin
			KEGIATAN															
		Optimalnya penggunaan jasa hubungan komunikasi sandi perangkat daerah	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase HIK PRKS yang teramanisasi	-	-	15%	Rp -	33%	Rp -	47%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	Diketahui	Kab.Tapin
		Pemenuhan kebutuhan perangkat PRKS	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan bahan tentang PRKS yang tersedia	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		Diketahui	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN															
		Tersedianya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-	-	2 Perangkat Daerah	Rp -	2 Perangkat Daerah	Rp -	2 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp 150.000.000	54 Perangkat Daerah	Rp 150.000.000	Diketahui	Kab.Tapin

MONEV RENCANA AKSI

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024 SECARA PERIODIK

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	NILAI SAKIP	-	79,50 Poin	79,50 Poin	79,50 Poin			79,50 Poin		-	-	79,50 Poin	79,50 Poin			Kepala Dinas
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	79,50 Poin	-	-			79,50 Poin		-	-	79,50 Poin	79,50 Poin			Kepala Dinas
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		-	76 Poin	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	76 Poin	7.662.471.631	79,05 Poin	79,05 Poin	79,05 Poin	79,05 Poin	6.936.129.789	90,52	Sekretaris
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah		25%	50%	75%	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindakan lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	18.600.000	25%	50	75	100	18.260.400	98,17	Kepala Subbagian Perencanaan & Pelaporan
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah		25%	50%	70%	90%		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	90%		25%	50	75	90			
		25%	50%	75%	95%		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	95%		25%	50	75	95			
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3	3	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	6.000.000	3	5	8	10	5.812.400	96,67	Subbagian Perencanaan & Pelaporan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.600.000	5	7	8	10	12.448.000	98,79	Subbagian Perencanaan & Pelaporan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	7.662.471.631	25%	50%	75%	100%	6.936.129.789	90,52	Sekretaris
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25%	50%	75%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	3.463.561.115	25	50	75	100	3.328.284.436	96,09	Kepala Subbagian Keuangan
		25%	50%	75%	100%		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%		25	50	75	100			
Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72	72	72	72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	288 Orang/Bulan	3.457.561.115	72	144	216	288	3.322.284.436	98,09	Subbagian Keuangan

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	0	0	0	1	3.000.000	100,00	Subbagian Keuangan
Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	0	1	1	2	3.000.000	100	Subbagian Keuangan
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	72 Poin	-	-			72 Poin								Kepala Dinas
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	7.662.471.631	25%	50%	75%	100%	6.936.129.789	90,52	Sekretaris
Meningkatnya ASN yang berkualitas		41%	41%	41%	41%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	41%	2.115.225.284	41	41	41	41	1.842.024.296	87,08	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	3	3	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	52.835.800	3	6	9	12	52.595.200	99,92	Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3	3	3	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	339.014.394	3	6	9	12	284.087.400	83,80	Subbagian Umum & Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3	3	3	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	50.010.100	3	6	9	12	49.832.000	99,24	Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		3	3	3	3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	20.000.000	3	6	9	11	13.839.800	68,20	Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	3	3	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	1.653.565.000	3	6	9	11	1.442.070.008	87,21	Subbagian Umum & Kepegawaian
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	7.662.471.631	25%	50%	75%	100%	6.936.129.789	90,52	Sekretaris
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)		25%	50%	75%	100%	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	1.134.939.288	0	50	100	100	1.068.537.000	94,15	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	18	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70 Unit	1.134.939.288	0	35	70	70	1.068.537.000	94,15	Subbagian Umum & Kepegawaian

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian		25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	538.929.464	25	50	75	100	446.265.712	82,81	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		3	3	3	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	293.713.144	3	6	9	11	209.400.752	71,29	Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3	3	3	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	245.216.320	3	6	9	12	238.864.960	96,59	Subbagian Umum & Kepegawaian
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)		25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	391.216.470	25,00	50	75	89	232.757.945	59,50	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan		1	1	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	80.160.700	1	2	2	3	60.087.945	74,96	Subbagian Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya		1	0	1	0	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit	25.131.030	1	1	2	2	18.125.000	72,12	Subbagian Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya		1	1	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	285.924.740	1	1	2	2	154.545.000	54,05	Subbagian Umum & Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	-	-	-	3,5 Poin			3,5 Poin		-	-	-	3,5 Poin			Kepala Dinas
Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) kabupaten tapin	-	-	-	3,5 Poin			3,5 Poin		-	-	-	3,5 Poin			Kepala Dinas
Meningkatnya citra positif atau persepsi positif terhadap kabupaten tapin		15%	30%	55%	70%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	70%		23	53	70	70			Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Terlaksananya Pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM) yang telah dibentuk		-	-	75%	-		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	75%		25	50	67	75			
Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah		20%	40%	60%	80%			Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%		23	53	75	80		

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)		-	-	90%	90%		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	90%	2.351.256.696	0	0	90	90	2.210.892.230	94,03	Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional		22%	40%	60%	86%		Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional	86%		14	23	27	51			Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		25%	45%	65%	90%		Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%		14	23	27	51			
Tersedianya konten informasi publik		25%	50%	75%	90%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	90%	2.351.256.696	20	50	90	90	2.210.892.230	94,03	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Optimalisasi kerja sama dengan media elektronik Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)		25%	40%	65%	87%		Persentase jumlah jam tayang	87%		22	39	61	105			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Terlaksananya MoU antar stakeholder untuk peningkatan jasa publikasi daerah		-	100%	-	-		Persentase MoU yang diterbitkan	100%		100	100	100	100			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya peran PPID pelaksana		25%	50%	75%	91%		Persentase PPID pelaksana aktif	91%		70	70	70	91			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya kapasitas admin PPID		15%	35%	50%	76%		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%		0	0	0	76			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)		15%	35%	50%	75%		Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	75%		0	43	58	75			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tertaksananya verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)		25%	50%	75%	90%		Persentase verifikasi yang respons time tertiadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%		14	23	27	51			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		3	3	3	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11 Dokumen	214.801.600	1	2	6	11	206.235.539	96,01	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		0	0	114	0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	114 Orang	12.223.900	0	0	114	114	11.632.800	95,16	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		2	2	2	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 Dokumen	408.146.892	2	4	7	9	393.348.275	96,37	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik		2	1	2	2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	7 Dokumen	170.881.104	1	1	1	5	58.020.000	33,95	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tersedianya Layanan Hubungan Media		1	1	1	1	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1.520.519.200	1	2	3	4	1.520.275.400	99,98	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		0	1	1	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	24.684.000	0	0	2	3	21.380.218	86,62	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya Jaringan Intra antar Perangkat Daerah yang dikelola oleh Diskominfo		0%	35%	35%	35%	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	35%	9.208.645.023	13	35	35	35	8.653.751.048	93,97	Kepala Bidang Penyelenggaraa n Egoovernment
Terintegrasinya pelayanan publik secara online antar perangkat daerah		20%	45%	65%	87%		Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87%		80	80	87	87			
Berkurangnya wilayah low spot (sinyal lemah)		15%	30%	45%	64%		Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	64%		54	56	56	66			Kepala Bidang Penyelenggaraa n Egoovernment
Pembangunan sarana telekomunikasi		15%	30%	45%	60%	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	60%	3.228.973.817	50	53	53	61	3.170.112.000	98,18	Bidang Penyelenggaraa n Egoovernment
Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi perangkat daerah		20%	45%	60%	87%		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%		80	80	87	87			Bidang Penyelenggaraa n Egoovernment
Meningkatnya tingkat keaktifan pengelolaan website perangkat daerah		15%	25%	45%	56%		Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	56%		38	42	42	56			Bidang Penyelenggaraa n Egoovernment
Melakukan monitoring pengelolaan website perangkat daerah		25%	50%	75%	100%		Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	56%		38	42	42	56			Bidang Penyelenggaraa n Egoovernment
Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	1	1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.332.287.428	2	3	4	5	1.330.043.000	99,83	Bidang Penyelenggaraan Egoovernment

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tertelaksanaanya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1	1	1	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit	1.866.686.391	0	4	4	4	1.840.089.000	97,01	Bidang Penyelenggaraan Egovernment
Meningkatnya kualitas akses internet untuk perangkat daerah		15%	30%	60%	74%	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%	5.979.671.206	70	74	74	74	5.483.639.048	91,70	Bidang Penyelenggaraa n Egovernment
Tercukupinya WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat		15%	25%	45%	56%		Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	56%		33	33	33	33			Bidang Penyelenggaraa n Egovernment
Tersedianya server yang sesuai standar		15%	30%	45%	64%		Persentase server sesuai standar	64%		64	64	64	64			Bidang Penyelenggaraa n Egovernment
Menyampaikan rekomendasi atas hasil survey kualitas akses internet untuk difindaklanuti		15%	30%	60%	74%		Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi	74%		70	74	74	74			Bidang Penyelenggaraa n Egovernment
Menambah wifi publik		15%	25%	45%	56%		Persentase wifi publik yang sudah terbangun	56%		33	33	33	33			Bidang Penyelenggaraa n Egovernment
Menambah kapasitas server		15%	30%	45%	67%		Persentase server yang mampu mengelola database	67%		50	67	67	67			Bidang Penyelenggaraa n Egovernment
Tertelaksanaanya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	1	1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	475.354.400	2	3	4	5	470.320.000	98,94	Bidang Penyelenggaraan Egovernment
Tertelaksanaanya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		1	1	1	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 Unit	528.210.466	0	1	2	4	493.249.910	93,38	Bidang Penyelenggaraan Egovernment
Tertelaksanaanya Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		3	3	3	4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	13 Dokumen	2.012.136.900	3	3	7	12	1.692.482.638	84,11	Bidang Penyelenggaraan Egovernment
Tertelaksanaanya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Dserah		3	3	3	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	11 Dokumen	2.518.850.300	2	3	3	11	2.440.980.000	96,91	Bidang Penyelenggaraan Egovernment

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		2	2	2	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	10 Dokumen	445.119.140	3	4	4	9	388.806.500	86,85	Bidang Penyelenggaraan Egovernment
Meningkatnya nilai indeks pembangunan Statistik (IPS)		-	-	2,6 Poin	-	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,6 Poin	617.564.020	-	-	2,63	2,63	574.276.525	92,99	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Memasukan Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Satu Pintu		25%	50%	70%	90%		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	90%		0	50	90	90			Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral		-	-	90%	90%		Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	90%		0	50	90	90			Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral		25%	50%	70%	90%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	90%	617.564.020	0	0	90	90	574.276.525	92,99	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya kerja sama dalam pengumpulan data sektoral dari perangkat daerah		25%	50%	70%	90%		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	90%		0	61	76	85			Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		15%	30%	45%	60%		Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	60%		40	40	60	60			Bidang Statistik dan Persandian
Tersedianya Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan) untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral		-	-	1 Aplikasi	-		Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	1 Aplikasi		1	1	1	1			Bidang Statistik dan Persandian
Tersusunnya Proses Bisnis Statistik Sektoral		-	-	1 Dokumen	-		Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 Dokumen		0	0	1	1			Bidang Statistik dan Persandian
Terlaksananya MoU dengan produsen data		-	-	-	90%		Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	90%		90	90	90	90			Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi		15%	25%	35%	50%		Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	50%		0	0	0	50			Bidang Statistik dan Persandian
Terlaksananya Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah		-	-	-	67%		Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	67%		0	0	67	67			Bidang Statistik dan Persandian

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN		
										TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		3	3	3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 Dokumen	409.328.310	0	2	3	11	397.178.825	97,03	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi		0	1	0	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	1 Orang	40.000.000	0	0	0	1	10.000.000	25,00	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		0	0	75	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	75 Orang	168.235.710	0	0	75	75	167.097.700	99,32	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya pengamanan sistem elektronik dan informasi		-	-	72%	-	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	72%	466.004.112	0	0	65	66	461.686.676	99,07	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Tata kelola pengamanan informasi		25%	50%	75%	100%		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%		21	44	66	100			Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Teknologi dan keamanan informasi		15%	25%	35%	50%		Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	50%		50	50	50	50			Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya SDM yang memiliki sertifikasi sandiman		-	-	50%	50%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sandiman yang tersertifikasi	50%	459.358.512	50	50	50	50	455.278.676	99,11	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Pengelolaan resiko keamanan informasi		15%	30%	45%	60%		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	60%		60	60	60	60			Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Kerangka kerja keamanan informasi		15%	30%	45%	60%		Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan	60%		60	60	60	60			Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Pengelolaan aset informasi		-	-	50%	50%		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%		0	0	50	50			Bidang Statistik dan Persandian
Terlaksananya bimtek sistem keamanan informasi		-	56%	-	-		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%		0	0	56	56			Bidang Statistik dan Persandian
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sandiman		-	-	50%	50%		Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	50%		50	50	50	50			Bidang Statistik dan Persandian

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU / SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET		REALISASI						PENANGGUNG JAWAB	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA				ANGGARAN									
				TW I	TW II			TW III	TW IV	(Rp)	(%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Optimalnya penggunaan tanda tangan elektronik pada perangkat daerah untuk tata kelola resiko keamanan informasi Terbentuknya tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menindaklanjuti laporan keamanan informasi Tertakutannya movev atas penggunaan TTE pada perangkat daerah		15%	25%	35%	68%		Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	30%		46	48	48	50			Bidang Statistik dan Persandian	
		100%	-	-	-		Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%		100	100	100	100				Bidang Statistik dan Persandian
		100%	100%	100%	100%		Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	100%		100	100	100	100				
Tertakutannya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		3	3	3	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	236.150.912	1	2	10	12	234.510.600	99,31	Bidang Statistik dan Persandian	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	54	0	0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	223.207.600	0	54	54	54	220.765.076	98,91	Bidang Statistik dan Persandian	
Optimalnya penggunaan pola hubungan komunikasi sandi perangkat daerah Tersusunnya kebijakan daerah tentang PHKS		-	33%	33%	33%	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IRII PHKS yang teramanikan	33%	0.645.000	33	33	33	33	6.410.000	96,45	Bidang Statistik dan Persandian	
		-	-	100%	100%		Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%		0	0	100	100			Bidang Statistik dan Persandian	
Tertakutannya Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	1	0	0	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	6.645.000	0	1	1	1	6.410.000	96,45	Bidang Statistik dan Persandian	
									20.305.941.483					18.836.738.268	92,76		

Rantau, 06 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin



Wahyudi Pranto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0	134.043.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0	134.043.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0	134.043.000,00
5	BELANJA	20.305.941.482,00	18.840.656.268,00	92,78	10.780.061.376,00
5.1	BELANJA OPERASI	16.434.256.544,00	15.132.469.268,00	92,08	8.606.753.920,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.458.581.115,00	3.322.284.438,00	96,06	2.945.100.331,00
5.1.02	Belanja Barang	12.975.675.429,00	11.810.184.832,00	91,02	5.371.653.589,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0	290.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	3.871.684.938,00	3.708.187.000,00	95,78	2.173.307.456,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	3.871.684.938,00	3.708.187.000,00	95,78	1.924.407.456,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	248.900.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(20.305.941.482,00)	(18.840.656.268,00)	0	(10.646.018.376,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(20.305.941.482,00)	(18.840.656.268,00)	0	(10.646.018.376,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2024

Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.000,00	0,00	12.448.000,00	0,00	12.448.000,00	98,79	152.000,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	0,00	5.812.400,00	0,00	5.812.400,00	96,87	187.600,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.600.000,00	0,00	18.260.400,00	0,00	18.260.400,00	98,17	339.600,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.457.561.115,00	3.322.284.436,00	0,00	0,00	3.322.284.436,00	96,09	135.276.679,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.453.561.115,00	3.322.284.436,00	6.000.000,00	0,00	3.328.284.436,00	96,09	135.276.679,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.635.800,00	0,00	52.595.200,00	0,00	52.595.200,00	99,92	40.600,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	339.014.394,00	0,00	284.087.400,00	0,00	284.087.400,00	83,80	54.926.994,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.010.100,00	0,00	49.632.000,00	0,00	49.632.000,00	99,24	378.100,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.06.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	0,00	13.639.600,00	0,00	13.639.600,00	68,20	6.360.400,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.653.565.000,00	0,00	1.445.990.096,00	0,00	1.445.990.096,00	87,45	207.574.904,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.115.225.294,00	0,00	1.845.944.296,00	0,00	1.845.944.296,00	87,27	269.280.998,00
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00.2-16.2-20.2-21.01.0.0.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.134.939.288,00	0,00	135.130.000,00	933.407.000,00	1.068.537.000,00	94,15	66.402.288,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.134.939.288,00	0,00	135.130.000,00	933.407.000,00	1.068.537.000,00	94,15	66.402.288,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.713.144,00	0,00	209.400.752,00	0,00	209.400.752,00	71,29	84.312.392,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.216.320,00	0,00	236.864.960,00	0,00	236.864.960,00	96,59	8.351.360,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG	538.929.464,00	0,00	446.265.712,00	0,00	446.265.712,00	82,81	92.663.752,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.160.700,00	0,00	60.087.945,00	0,00	60.087.945,00	74,96	20.072.755,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.131.030,00	0,00	18.125.000,00	0,00	18.125.000,00	72,12	7.006.030,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.924.740,00	0,00	154.545.000,00	0,00	154.545.000,00	54,05	131.379.740,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.662.471.531,00	3.322.284.436,00	2.684.558.353,00	933.407.000,00	6.940.249.789,00	90,57	722.421.842,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	391.216.470,00	0,00	232.757.945,00	0,00	232.757.945,00	59,50	158.458.525,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	214.801.600,00	0,00	206.235.539,00	0,00	206.235.539,00	96,01	8.566.061,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	408.145.892,00	0,00	393.348.275,00	0,00	393.348.275,00	96,37	14.797.617,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	176.881.104,00	0,00	58.020.000,00	0,00	58.020.000,00	33,35	112.861.104,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	1.520.519.200,00	0,00	1.520.275.400,00	0,00	1.520.275.400,00	99,98	243.800,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	12.223.900,00	0,00	11.632.800,00	0,00	11.632.800,00	95,16	591.100,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.684.000,00	0,00	21.380.216,00	0,00	21.380.216,00	86,62	3.303.784,00
	TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.351.256.696,00	0,00	2.210.892.230,00	0,00	2.210.892.230,00	94,03	140.364.466,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.351.256.696,00	0,00	2.210.892.230,00	0,00	2.210.892.230,00	94,03	140.364.466,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diletakkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.332.267.426,00	0,00	1.330.043.000,00	0,00	1.330.043.000,00	99,83	2.244.426,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.0.0 . 3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.695.566.391,00	0,00	360.959.000,00	1.480.000.000,00	1.840.959.000,00	97,01	35.617.391,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.228.973.817,00	0,00	1.699.112.000,00	1.480.000.000,00	3.179.112.000,00	98,18	58.861.817,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.0.0.3.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.16.2-16.2-20.2-21.01.0.0.3.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.354.400,00	0,00	439.200.000,00	31.120.000,00	470.320.000,00	98,94	5.034.400,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.0.0.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	528.210.466,00	0,00	493.249.910,00	0,00	493.249.910,00	93,38	34.960.556,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.0.0.3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.012.136.900,00	0,00	428.822.638,00	1.263.660.000,00	1.692.482.638,00	84,11	319.654.262,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.0.0.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.518.850.300,00	0,00	2.440.980.000,00	0,00	2.440.980.000,00	96,91	77.870.300,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.0.0.3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	445.119.140,00	0,00	386.606.500,00	0,00	386.606.500,00	86,85	58.512.640,00
	TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.208.645.023,00	0,00	5.878.971.048,00	2.774.780.000,00	8.653.751.048,00	93,97	554.893.975,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.979.671.206,00	0,00	4.188.859.048,00	1.294.780.000,00	5.483.639.048,00	91,70	496.032.158,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
2.20.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	409.328.310,00	0,00	397.178.825,00	0,00	397.178.825,00	97,03	12.149.485,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	25,00	30.000.000,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	168.235.710,00	0,00	167.097.700,00	0,00	167.097.700,00	99,32	1.138.010,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	617.564.020,00	0,00	574.276.525,00	0,00	574.276.525,00	92,99	43.287.495,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	617.564.020,00	0,00	574.276.525,00	0,00	574.276.525,00	92,99	43.287.495,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.21.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	236.150.912,00	0,00	234.510.600,00	0,00	234.510.600,00	99,31	1.640.312,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	223.207.600,00	0,00	220.766.076,00	0,00	220.766.076,00	98,91	2.441.524,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
2.21.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.02	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	459.368.512,00	0,00	455.276.676,00	0,00	455.276.676,00	99,11	4.081.836,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.0.0.2.2.02.1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	6.645.600,00	0,00	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	96,45	235.600,00
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
Jumlah		20.305.941.482,00	3.322.284.436,00	11.810.184.832,00	3.708.187.000,00	18.840.656.268,00	92,78	1.465.285.214,00

Rantau, 14 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, M.T

NIP197101301999031005

